

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
(dahulu/*formerly* PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2022/
31 DECEMBER 2022**

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
DIRECTORS' STATEMENT REGARDING

TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA
TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022

THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2022

PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (DAHULU/FORMERLY PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di
bawah ini

On behalf of the Board of Directors, we, the
undersigned:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama/Name
Alamat Kantor/Office Address | : | Iwan Agung Firstantara
Jl. Hj. Tutty Alawiyah No 10, Kelurahan Kalibata,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740. |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas
lain/ Domicile as stated in ID Card | : | Suryodiningratan MJ 2/786 RT 39 RW 11, Kelurahan
Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron Kota
Yogyakarta |
| Nomor telepon/Phone number
Jabatan/Position | : | 087867181085
Direktur Utama/President Director |
| 2. Nama/Name
Alamat Kantor/Office Address | : | Efin Febriantoro R
Jl. Hj. Tutty Alawiyah No 10, Kelurahan Kalibata,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740. |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas
lain/ Domicile as stated in ID Card
Nomor telepon/Phone number
Jabatan/Position | : | Ketintang Tengah RT 04 RW 01, Kelurahan Ketintang,
Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya
081553358600
Direktur Keuangan/Finance Director |
- menyatakan bahwa:
1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT PLN Energi Primer Indonesia (dahulu PT PLN Batubara) dan entitas anak ("Grup");
 2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.
- Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi.

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT PLN Energi Primer Indonesia (formerly PT PLN Batubara) (the "Group");
2. The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information has been disclosed in a complete and truthful manner in the Group's consolidated financial statements;
b. The Group's consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts; and
4. We are responsible for the Group's internal control systems.

This statement is confirmed to the best of our knowledge and belief.
For and on behalf of the Board of Directors.

Iwan Agung Firstantara
Direktur Utama/President Director



Efin Febriantoro R
Direktur Keuangan /Finance Director

JAKARTA
Juni /June 9 2023



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEPADА PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF

PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (DAHULU/FORMERLY PT PLN BATUBARA)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT PLN Energi Primer Indonesia (dahulu PT PLN Batubara) dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistik selain melaksanakannya.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT PLN Energi Primer Indonesia (formerly PT PLN Batubara) and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id



Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate,*



auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

JAKARTA,
9 Juni/June 2023


Firman Sababalat, CPA
Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.1789

to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.



PLN Energji Primer Indonesia
01019/2.1025/AU.1/G2/m 789-2/1/VI/2023

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/1 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali nilai nominal dan data saham)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
except for par value and share data)

	Catatan/ Notes	2022	2021	ASSETS
ASET				
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4	639,241	806,429	<i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang usaha	5	1,017,090	1,190,986	<i>Trade receivables</i>
Piutang non-usaha, bagian lancar	6	207,645	-	<i>Non-trade receivables, current portion</i>
Persediaan		331,978	122,564	<i>Inventories</i>
Uang muka dan biaya dibayar di muka, bagian lancar	7	11,036	32,110	<i>Advances and prepaid expenses, current portion</i>
Pajak dibayar di muka, bagian lancar				<i>Prepaid taxes, current portion</i>
- Pajak lain-lain	14a	265,490	666,967	<i>Other taxes -</i>
Aset lancar lainnya		<u>45,058</u>	<u>38,365</u>	<i>Other current assets</i>
Jumlah aset lancar		<u>2,517,538</u>	<u>2,857,421</u>	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya		23,759	21,224	<i>Restricted cash and cash equivalents</i>
Piutang non-usaha, bagian tidak lancar	6	542,638	490,292	<i>Non-trade receivables, non-current portion</i>
Uang muka dan biaya dibayar di muka, bagian tidak lancar	7	-	43,500	<i>Advances and prepaid expenses, non-current portion</i>
Properti pertambangan	8	1,857,061	1,897,651	<i>Mining properties</i>
Investasi entitas asosiasi	9	592,423	570,081	<i>Investment in associates</i>
Pajak dibayar di muka, bagian tidak lancar	14a			<i>Prepaid taxes, non-current portion</i>
- Pajak penghasilan		137,623	102,937	<i>Corporate income tax -</i>
- Pajak lain-lain		110,515	83,137	<i>Other taxes -</i>
Aset pajak tangguhan	14d	40,529	40,814	<i>Deferred tax assets</i>
Aset tetap		40,010	38,205	<i>Fixed assets</i>
Aset hak-guna		6,670	5,808	<i>Right-of-use assets</i>
Aset tidak lancar lainnya		<u>83,306</u>	<u>35,396</u>	<i>Other non-current assets</i>
Jumlah aset tidak lancar		<u>3,434,534</u>	<u>3,329,045</u>	Total non-current assets
JUMLAH ASET		<u>5,952,072</u>	<u>6,186,466</u>	TOTAL ASSETS

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/2 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali nilai nominal dan data saham)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
except for par value and share data)

Catatan/ <u>Notes</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	10	1,128,205	1,779,422
Biaya masih harus dibayar	11	427,589	445,221
Utang lain-lain, jangka pendek	12	342,665	277,598
Pinjaman pemegang saham, jangka pendek	13	78,129	158,752
Utang pajak	14b		
- Pajak penghasilan		19,719	12,938
- Pajak lain-lain		110,368	32,681
Liabilitas sewa, jangka pendek		<u>3,640</u>	<u>3,659</u>
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>2,110,315</u>	<u>2,710,271</u>
CURRENT LIABILITIES			
Trade payables			
Accrued expenses			
Other payables, current portion			
Shareholder loan, current portion			
Taxes payable			
Corporate income tax -			
Other taxes -			
Lease liabilities, current portion			
Total current liabilities			
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang lain-lain, jangka panjang	12	54,899	142,213
Pinjaman pemegang saham, jangka panjang	13	549,792	542,260
Liabilitas sewa, jangka panjang		2,561	1,962
Liabilitas imbalan pascakerja		10,281	6,163
Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang		<u>11,692</u>	<u>11,692</u>
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>629,225</u>	<u>704,290</u>
NON-CURRENT LIABILITIES			
Other payables, non-current portion			
Shareholder loan, non-current portion			
Lease liabilities, non-current portion			
Post-employment benefit liabilities			
Provision for environmental reclamation and mine closure			
Total non-current liabilities			
JUMLAH LIABILITAS			
	<u>2,739,540</u>	<u>3,414,561</u>	<u>TOTAL LIABILITIES</u>
EKUITAS			
Modal saham:			
Modal dasar - 100.000 lembar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh - 25.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	15	25,000	25,000
Tambahan modal disetor	13	368,877	462,171
Saldo laba		2,052,843	1,544,880
Rugi komprehensif lain		<u>(42,417)</u>	<u>(51,584)</u>
	<u>2,404,303</u>	<u>1,980,467</u>	
Kepentingan non-pengendali	16	808,229	791,438
JUMLAH EKUITAS		<u>3,212,532</u>	<u>2,771,905</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>5,952,072</u>	<u>6,186,466</u>
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY			

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 2 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
Penjualan	17	10,620,147	13,845,529	Sales
Beban pokok penjualan	18	<u>(9,779,801)</u>	<u>(12,937,619)</u>	Cost of sales
Laba bruto		840,346	907,910	Gross profit
Beban umum dan administrasi		(109,807)	(90,144)	General and administrative expenses
Penghasilan keuangan		23,373	16,059	Finance income
Beban keuangan		(76,782)	(84,729)	Finance expenses
Penghasilan/(beban) lain-lain, bersih	19	<u>26,284</u>	<u>(110,760)</u>	Other income/(expenses), net
Laba sebelum pajak		703,414	638,336	Profit before tax
Beban pajak penghasilan	14c	<u>(178,660)</u>	<u>(189,042)</u>	Income tax expense
Laba tahun berjalan		524,754	449,294	Profit for the year
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan:				Other comprehensive income/ (loss) for the year:
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				<i>Items that will be reclassified to profit or loss:</i>
Bagian atas penghasilan komprehensif lainnya entitas asosiasi	9	<u>9,949</u>	<u>899</u>	Share of other comprehensive income of associates
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				<i>Items that will not be reclassified to profit or loss:</i>
Pengukuran kembali aset non-keuangan anak perusahaan		-	(60,083)	Remeasurement of subsidiary's non-financial assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		(1,002)	1,262	Remeasurement of employee benefit liabilities
Pajak penghasilan terkait	14d	<u>220</u>	<u>(278)</u>	Related Income tax
		<u>(782)</u>	<u>(59,099)</u>	
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain, setelah pajak		9,167	(58,200)	Other comprehensive income/ (loss), net of tax
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		533,921	391,094	Total comprehensive income for the year
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				Profit for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		507,963	427,603	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		<u>16,791</u>	<u>21,691</u>	Non-controlling interests
		<u>524,754</u>	<u>449,294</u>	
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		517,130	369,403	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		<u>16,791</u>	<u>21,691</u>	Non-controlling interests
		<u>533,921</u>	<u>391,094</u>	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 3 Schedule

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah)

	Yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ <i>Attributable to the owners of the parent entity</i>						<i>Balance as at 1 January 2021</i>
	Modal saham <i>Share capital</i>	Tambahan modal disetor/ <i>Additional paid-in capital</i>	Saldo laba/ <i>Retained earnings</i>	Rugi komprehensif lain/ <i>Other comprehensive loss</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Kepentingan non-pengendali/ <i>Non-controlling interests</i>	
Saldo 1 Januari 2021	25,000	462,171	1,117,277	6,616	1,611,064	769,747	2,380,811
Laba tahun berjalan	-	-	427,603	-	427,603	21,691	449,294
Rugi komprehensif lain	-	-	-	(58,200)	(58,200)	-	(58,200)
Saldo 31 Desember 2021	25,000	462,171	1,544,880	(51,584)	1,980,467	791,438	2,771,905
Laba tahun berjalan	-	-	507,963	-	507,963	16,791	524,754
Perubahan nilai wajar pinjaman pemegang saham (Catatan 13)	-	(93,294)	-	-	(93,294)	-	(93,294)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	9,167	9,167	-	9,167
Saldo 31 Desember 2022	25,000	368,877	2,052,843	(42,417)	2,404,303	808,229	3,212,532
							<i>Balance as at 31 December 2022</i>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

*The accompanying notes to the consolidated financial statements
form an integral part of these consolidated financial statements.*

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 4 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)**

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah)**

	2022	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	10,794,043	16,231,865	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(10,479,375)	(15,381,772)	Payments to suppliers and employees
Pembayaran pajak penghasilan badan	(213,164)	(286,405)	Payments of corporate income tax
Penerimaan pengembalian pajak	4,739	136,877	Receipts of tax refunds
Pembayaran beban royalti	(35,383)	(31,494)	Payments of royalty expenses
Pembayaran beban keuangan	(2,741)	(8,104)	Payments of finance expenses
Penerimaan pendapatan keuangan	23,373	16,059	Receipts of finance income
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	91,492	677,026	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian aset tetap	(14,036)	(25,592)	Acquisitions of fixed assets
Penambahan properti pertambangan	(924)	(363)	Additions of mining properties
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(14,960)	(25,955)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran liabilitas sewa	(6,249)	(516)	Payments of lease liabilities
Pembayaran pinjaman pemegang saham	(237,471)	(255,491)	Payments of shareholder loan
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(243,720)	(256,007)	Net cash used in financing activities
(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(167,188)	395,064	NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	806,429	411,365	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	639,241	806,429	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/1 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT PLN Energi Primer Indonesia (dahulu PT PLN Batubara) ("Perusahaan") didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 11 Agustus 2008 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-58468.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 November 2008, Tambahan No. 91.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan Akta Notaris No. 72 tanggal 30 Desember 2022, dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta, untuk mengubah nama Perusahaan yang semula bernama PT PLN Batubara menjadi PT PLN Energi Primer Indonesia. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0000004.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 1 Januari 2023.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan usaha di bidang penyediaan energi primer untuk mendukung kebutuhan unit pembangkit listrik ataupun kebutuhan lainnya berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"), sebuah perusahaan yang berdiri dan berkedudukan di Indonesia.

Kantor pusat Perusahaan beralamat di Jl. Warung Buncit Raya No.10, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12740.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah karyawan Perusahaan sebanyak 118 karyawan (2021: 109 karyawan) (tidak diaudit).

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT PLN Energi Primer Indonesia (formerly PT PLN Batubara) (the "Company") was established in Jakarta based on Deed No. 3 dated 11 August 2008 of Lenny Janis Ishak, S.H., notary in Jakarta, which was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-58468.AH.01.01.Tahun 2008 dated 3 September 2008 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated 11 November 2008, Supplement No. 91.

The Articles of Association of the Company have been amended several times. The articles of Association of the Company were recently amended by Notarial Deed No. 72 dated 30 December 2022, of Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta, to change the Company's name from PT PLN Batubara to PT PLN Energi Primer Indonesia. This change was received and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree Letter No. AHU-0000004.AH.01.02.TAHUN 2023 dated 1 January 2023.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activity is to operate the business of primary energy supply to support the requirement of power plant units or other requirements based on healthy industry commerce and principles.

The Company's parent entity is PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"), a company which is incorporated and domiciled in Indonesia.

The Company's head office is located at Jl. Warung Buncit Raya No.10, Kalibata, Pancoran District, South Jakarta, 12740.

As at 31 December 2022, the Company had a total number of 118 employees (2021: 109 employees) (unaudited).

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/2 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Pembentukan struktur subholding

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Republik Indonesia No.S-886/MBU/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Persetujuan Pembentukan Holding dan Subholding PLN Masa/Tahap Legal End-State serta Restrukturisasi dan Pengalihan Harta yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 69 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta Selatan, PLN membentuk empat subholding yang terdiri dari:

1. Dua subholding di bidang pembangkitan tenaga listrik, yaitu PT PLN Nusantara Power (dahulu PT Pembangkitan Jawa Bali) ("PNP") dan PT PLN Indonesia Power (dahulu PT Indonesia Power) ("PIP");
2. Satu subholding di bidang penyediaan dan logistik energi primer, yaitu Perusahaan; dan
3. Satu subholding untuk kegiatan usaha di luar pembangkitan, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan (*Beyond kWh*), yaitu bernama PT Indonesia Comnet Plus ("ICON+").

Sebagai tindak lanjut pembentukan subholding PLN tersebut sesuai dengan Akta Notaris No. 78 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta Selatan tentang penyetoran modal non-tunai (inbreng) PLN ke Perusahaan, yang menyatakan bahwa PLN akan secara hukum mengalihkan pengendalian, termasuk aset, kewajiban, keuntungan dan kerugian yang didapat dari penyertaan saham atas PT PLN Gas dan Geothermal ("PLNGG") dan PT Bahtera Adhiguna ("BAG") kepada Perusahaan sejak tanggal efektif pengalihan di 1 Januari 2023.

c. Informasi lain

Pada tanggal 31 Desember 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris

Yusuf Didi Setiarto
Benny Pasaribu
Daneth Fitrianto
Lana Saria
Singgih Widagdo
Ian Siagian

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

1. GENERAL (continued)

b. Establishment of subholding structures

Based on the Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprises ("SOE") of the Republic of Indonesia No. S-886/MBU/12/2022 dated 30 December 2022 regarding the Approval for the Establishment of Holding and Subholding of PLN for the Legal End-State Period/Stage as well as the Restructuring and Transfer of Assets as stated in the Notarial Deed No. 69, dated 30 December 2022, of Muhammad Hanafi, S.H., notary in South Jakarta, PLN established four subholdings, consisting of:

1. Two subholdings in the power generation sector, namely PT PLN Nusantara Power (formerly Pembangkitan Jawa Bali) ("PNP") and PT PLN Indonesia Power (formerly PT Indonesia Power) ("PIP");
2. One subholding in the primary energy procurement and logistics sector, which is the Company; and
3. One subholding for business activities outside of power generation, transmission, and distribution (*Beyond kWh*), namely PT Indonesia Comnet Plus ("ICON+").

As a follow-up to the establishment of the PLN subholding in accordance with Notarial Deed No. 78 dated 30 December 2022, of Muhammad Hanafi, S.H., notary in South Jakarta regarding PLN's non-cash paid in capital to the Company, it was stated that PLN will legally transfer control, including assets, liabilities, profits and losses derived from the investment in shares of PT PLN Gas dan Geothermal ("PLNGG") and PT Bahtera Adhiguna ("BAG") to the Company from the effective date of the transfer on 1 January 2023.

c. Other information

As at 31 December 2022, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors is as follows:

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/3 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Informasi lain (lanjutan)

Direksi

Direktur Utama
Direktur Batubara
Direktur Gas dan BBM
Direktur Biomassa
Direktur Keuangan
Direktur Manajemen Sumber
Daya Manusia dan Administrasi

Iwan Agung Firstantara
Ary Bastari
Rakhmad Dewanto
Antonius Aris Sudjatmiko
Efin Febriantoro R.
Bagus Setiawan

Board of Directors
President Director
Coal Director
Gas and Fuel Director
Biomass Director
Finance Director
Human Resources Management and Administration Director

Pada tanggal 31 Desember 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

As at 31 December 2021, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors is as follows:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris

Tisna Gunawan
Ian Siagian
Singgih Widagdo

Board of Commissioners
President Commissioner
Commissioner
Commissioner

Direksi

Direktur Utama
Direktur Keuangan dan
Sumber Daya Manusia
Direktur Operasi
Direktur Pengembangan

Ary Bastari
Hidmad Erhansyah
Tri Joko Supriyatno
Eko Yuniaro

Board of Directors
President Director
Finance and Human
Resources Director
Operation Director
Development Director

d. Entitas anak

Perusahaan mempunyai kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung pada entitas anak sebagai berikut:

d. Subsidiaries

The Company has either direct or indirect ownership in the following subsidiaries:

Entitas/Entity	Domicili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of Business	Percentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Tahun operasi komersial/ Commercial operation	Jumlah aset sebelum eliminasi *) Total assets before elimination *)	
			31 Desember/ December 2022	31 Desember/ December 2021		31 Desember/ December 2022	31 Desember/ December 2021
Kepemilikan langsung/ Direct ownership							
PT Jambi Prima Coal ("JPC")	Jambi	Pertambangan batubara/ Coal mining	60.00	60.00	2010	254,415	263,201
PT PLN Batubara Investasi ("BBI")	Jakarta	Investasi/Investment	99.99	99.99	2018	1,900,029	1,857,091
PT PLN Batubara Niaga ("BBN")	Jakarta	Perdagangan batubara/ Coal trading	99.99	99.99	2020	1,299,559	233,410
Kepemilikan tidak langsung melalui BBI/ Indirect ownership through BBI							
PT Bangun Persada Jambi Energi ("BPJE")	Jambi	Pertambangan batubara/ Coal mining	80.00	80.00	**)	36,955	36,955
PT Mahakarya Abadi Prima ("MAP")	Jambi	Pertambangan batubara/ Coal mining	80.00	80.00	**)	2,986	2,985
PT Banyan Koalindo Lestari ("BKL")	Palembang	Pertambangan batubara/ Coal mining	51.00	51.00	2018	494,326	442,012
PT Prima Bara Indonesia ("PBI")	Banjarbaru	Pertambangan batubara/ Coal mining	51.00	51.00	**)	186,976	145,678

*) Dalam jutaan rupiah/Stated in millions of rupiah

**) Belum beroperasi komersial/Not yet in commercial operation

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

In these consolidated financial statements, the Company and the subsidiaries are collectively referred to as the "Group".

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/4 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

e. Izin pertambangan

Entitas/ Entity	Lokasi/ Location	Tanggal perolehan izin produksi/ Production license acquisition date	Tanggal jatuh tempo/ Due date	Total cadangan terbukti (MT)/ Proven reserves (MT) (tidak diaudit/ unaudited)	Total cadangan terkira (MT)/ Probable reserves (MT) (tidak diaudit/ unaudited)
JPC	Jambi	28 Desember/ December 2009	28 Desember/ December 2027	63,000,000	27,000,000
BPJE	Jambi	28 Desember/ December 2011	28 Desember/ December 2031	4,000,000	3,000,000
MAP*)	Jambi	15 Maret/ March 2015	15 Maret/ March 2035	11,000,000	7,000,000
BKL	Palembang	19 April/ April 2010	18 April/ April 2030	18,100,000	2,700,000
PBI*)	Banjarbaru	17 Februari/ February 2015	17 Februari/ February 2035	22,000,000	17,000,000

*) Lihat Catatan 25 terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan ("IUP") milik MAP dan PBI.

*) See Note 25 related to revocation of Mining Business Licences ("IUP") of MAP and PBI.

Informasi terkait jumlah cadangan yang tercantum dalam laporan ini didasarkan pada:

Information in this report relates to amount of reserves based on:

- a. JPC, BPJE dan MAP berdasarkan *Statement of Open Cut Coal Resources and Reserves as at 31 July 2017* oleh RPM Global tanggal 19 Oktober 2017;
- b. BKL berdasarkan *Statement of Open Cut Coal Resources and Reserves as at 31 July 2017* oleh PT New Resource Mine ("NRM") Consulting tanggal 31 Juli 2018;
- c. PBI berdasarkan *Statement of Open Cut Coal Resources and Reserves as at 31 July 2018* oleh RPM Global tanggal 29 Januari 2019.

a. JPC, BPJE and MAP based on Statement of Open Cut Coal Resources and Reserves as at 31 July 2017 by RPM Global dated 19 October 2017;

b. BKL based on Statement of Open Cut Coal Resources and Reserves as at 31 July 2017 by PT New Resource Mine ("NRM") Consulting dated 31 July 2018;

c. PBI based on Statement of Open Cut Coal Resources and Reserves as at 31 July 2018 by RPM Global dated 29 January 2019.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK").

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS").

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/5 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini dibulatkan dan disajikan dalam jutaan rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Untuk memberi pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Grup, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi akuntansi penting. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

Selain yang dijelaskan di bawah, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penerapan dari amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The preparation and presentation of the consolidated financial statements are based on going concern assumption and the measurement basis is historical cost, except for certain accounts that have been measured on the basis described in the related accounting policies.

The consolidated statement of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

Figures in the consolidated financial statements are rounded and stated in millions of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

In order to provide further understanding of the financial performance of the Group, due to the significant nature or amount, several items of income or expenses have been shown separately.

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

Except as described below, the accounting policies applied are consistent with the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2021, which conform to Indonesian Financial Accounting Standards.

The adoption of the following amendments and annual improvements to accounting standards which are effective from 1 January 2022 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current year:

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/6 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan"
- Amandemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjenji, dan Aset Kontinjenji - Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"
- Penyesuaian tahunan PSAK 69 "Agrikultur"
- Penyesuaian tahunan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAK 73 "Sewa"

Standar baru, amandemen dan revisi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- PSAK 74 "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Kewajiban Lancar atau Tidak Lancar"
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan"
- Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan"
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi"
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal"
- Amandemen PSAK 73 "Sewa terkait Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik"
- Amandemen PSAK 74 "Kontrak Asuransi" tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif
- Revisi PSAK 101 "Penyajian Laporan Keuangan Syariah"
- Revisi PSAK 107 "Akuntansi Ijarah"
- Revisi PSAK 109 "Akuntansi Zakat, Infaq dan sedekah"

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

- Amendment to SFAS 22 "Business Combinations - References to the Conceptual Framework for Financial Reporting"
- Amendment to SFAS 57 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Onerous Contracts - Cost of Fulfilling a Contract"
- Annual improvement to SFAS 69 "Agriculture"
- Annual improvement to SFAS 71 "Financial Instruments"
- Annual improvement to SFAS 73 "Leases"

New standards, amendments and revisions issued but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2022 are as follows:

- SFAS 74 "Insurance Contracts"
- Amendment to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-current"
- Amendment to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements - Disclosure of Accounting Policies"
- Amendment to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements - Long-term liabilities with Covenants"
- Amendment to SFAS 16 "Property, Plant and Equipment - Proceeds before Intended Use"
- Amendment to SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates"
- Amendment to SFAS 46 "Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction"
- Amendment to SFAS 73 "Leases related to Lease Liability in a Sale and Leaseback Transactions"
- Amendment to SFAS 74 "Insurance Contracts" regarding Initial Application of SFAS 74 and SFAS 71 - Comparative Information
- Revision to SFAS 101 "Presentation of Sharia Financial Statements"
- Revision to SFAS 107 "Ijarah Accounting"
- Revision to SFAS 109 "Zakah, Infaq and Sadaqah Accounting"

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/7 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Standar baru, amandemen, dan revisi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, kecuali untuk Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan", Amandemen PSAK 73, Revisi PSAK 101 dan Revisi PSAK 109 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, dan PSAK 74 dan Amandemen PSAK 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen, revisi dan penyesuaian tahunan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

b. Konsolidasi

i. Entitas anak

Entitas anak adalah semua entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas itu.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal dimana pengendalian dialihkan kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya dan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjenpsi.

Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjenpsi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

The above new standard, amendments and revisions are effective beginning 1 January 2023, except for Amendment to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements - Long-term Liabilities with Covenants", Amendment to SFAS 73, Revision to SFAS 101 and Revision to SFAS 109 which are effective beginning 1 January 2024, and SFAS 74 and Amendment to SFAS 74 which are effective beginning 1 January 2025, but early adoption is permitted.

As at the completion date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards, amendments, revisions and annual improvements on the Group's consolidated financial statements.

b. Consolidation

i. Subsidiaries

Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to the Group and are deconsolidated from the date on which control ceases.

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is equivalent to the fair value of the assets transferred, the liabilities recognised to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement.

Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/8 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Konsolidasi (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi untuk setiap akuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset bersih pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi melalui laba rugi. Pihak pengakuisisi mungkin telah mengakui perubahan nilai wajar atas kepentingan ekuitasnya dalam penghasilan komprehensif lain. Jika demikian, jumlah yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika pihak pengakuisisi telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

Imbalan kontinjenyi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjenyi yang diakui sebagai asset atau liabilitas dicatat dalam laba rugi. Imbalan kontinjenyi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Selisih lebih dari jumlah imbalan yang dialihkan dengan nilai wajar jumlah kepentingan non-pengendali atas jumlah neto aset dan kewajiban teridentifikasi yang diakuisisi dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah imbalan ini lebih rendah dari nilai wajar aset bersih teridentifikasi atas entitas yang diakuisisi, dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui langsung dalam laba rugi.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Consolidation (continued)

i. Subsidiaries (continued)

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. The non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statements of financial position, separately from the owner of the parent's equity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss. The acquirer may have recognised changes in the value of its equity interest in other comprehensive income. If so, the amount that was recognised in other comprehensive income shall be recognised on the same basis as would be required if the acquirer has disposed directly of the previously held equity interest.

Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that are deemed to be assets or liabilities are recognised in profit or loss. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured and its subsequent settlement is accounted for within equity.

Goodwill is initially measured as the excess of the aggregate of the consideration transferred, and the fair value of non-controlling interest over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net identifiable assets of the subsidiary acquired, in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/9 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Konsolidasi (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

Transaksi, saldo dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan akuntansi yang dianut oleh Grup.

ii. Perubahan kepemilikan tanpa kehilangan pengendalian

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagiannya atas jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

iii. Pelepasan entitas anak

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan, dan biasanya Grup memiliki 20% atau lebih hak suara, tetapi tidak melebihi 50% hak suara. Investasi pada entitas asosiasi dicatat pada laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Consolidation (continued)

i. Subsidiaries (continued)

Intercompany transactions, balances and unrealised gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated. Accounting policies of subsidiaries have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

ii. Changes in ownership interest in subsidiaries without change of control

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying amount of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

iii. Disposal of subsidiaries

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets (including any goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss, or transferred directly to retained earnings if required under other SFAS.

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained on the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

iv. Accounting for associates

An associate is an entity over which the Group has significant influence, but not control, and is generally accompanied by a shareholding giving rise to voting rights of 20% or greater but not exceeding 50%. Investment in associates are accounted for in the consolidated financial statements using the equity method less impairment losses, if any.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/10 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Konsolidasi (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi (lanjutan)

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan, dan biasanya Grup memiliki 20% atau lebih hak suara, tetapi tidak melebihi 50% hak suara. Investasi pada entitas asosiasi dicatat pada laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

- Akuisisi

Investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrumen ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

Goodwill pada akuisisi entitas asosiasi merupakan selisih lebih yang terkait dengan biaya perolehan investasi pada entitas asosiasi dengan bagian Grup atas nilai wajar neto aset teridentifikasi dari entitas asosiasi dan dimasukkan dalam jumlah tercatat investasi.

- Metode ekuitas

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Grup atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Consolidation (continued)

iv. Accounting for associates (continued)

An associate is an entity over which the Group has significant influence, but not control, and is generally accompanied by a shareholding giving rise to voting rights of 20% or greater but not exceeding 50%. Investment in associates are accounted for in the consolidated financial statements using the equity method less impairment losses, if any.

- Acquisition

Investment in an associate is initially recognised at cost. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the assets transferred, equity instruments issued or liabilities incurred or assumed as at the date of exchange, plus costs directly attributable to the acquisition.

Goodwill on the acquisition of an associate represents the excess of the cost of acquisition of the associate over the Group's share of the fair value of the identifiable net assets of the associate and is included in the carrying amount of the investment.

- Equity method of accounting

In applying the equity method of accounting, the Group's share of its associate's post-acquisition profit or loss is recognised in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognised in other comprehensive income.

These post-acquisition movements and distributions received from an associate are adjusted against the carrying amounts of the investment.

When the Group's share of the losses of an associate equals or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured non-current receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the associate.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/11 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Konsolidasi (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi (lanjutan)

- Metode ekuitas (lanjutan)

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar bagian Grup dalam entitas asosiasi tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi. Jika bukti tersebut ada, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

- Pelepasan

Investasi pada entitas asosiasi dihentikan pengakuannya apabila Grup tidak lagi memiliki pengaruh signifikan. Grup mengukur investasi yang tersisa sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian atau dilusi yang timbul pada investasi pada entitas asosiasi dimana pengaruh signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba rugi dan hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Consolidation (continued)

iv. Accounting for associates (continued)

- Equity method of accounting (continued)

Unrealised gains on transactions between the Group and its associates are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of the impairment of the asset being transferred. The accounting policies of the associate have been changed where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.

Dividend receivables from an associate are recognised as reductions in the carrying amount of the investment.

At each reporting date, the Group determines whether there is any objective evidence that the investment in an associate is impaired. If any such evidence exists, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying amount and recognises the amount in profit or loss.

- Disposals

An investment in an associate is derecognised when the Group loses significant influence and any retained equity interest in the entity is remeasured at its fair value. The difference between the carrying amount of the retained interest at the date when significant influence is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

Gains and losses arising from partial disposal or dilution of an investment in an associate in which significant influence is retained are recognised in profit or loss, and only a proportionate share of the amount previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/12 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Goodwill

Goodwill timbul dari akuisisi entitas anak dan merupakan selisih imbalan yang ditransfer terhadap kepemilikan dalam nilai wajar neto atas aset, liabilitas, dan liabilitas kontingenji teridentifikasi dan nilai wajar kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi.

Untuk pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dialokasikan pada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK"), atau kelompok UPK, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh alokasi *goodwill* menunjukkan tingkat terendah dalam entitas yang *goodwill*-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal. *Goodwill* dipantau pada level segmen operasi.

d. Penjabaran mata uang asing

- Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah Indonesia ("Rp" atau "IDR"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian Grup.

- Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Goodwill

Goodwill arises from the acquisition of subsidiaries and represents the excess of the consideration transferred over the interest in the net fair value of the net identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the acquiree and the fair value of the non-controlling interest in the acquiree.

For the purposes of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is allocated to each Cash-Generating Unit ("CGU"), or group of CGUs, that is expected to benefit from the synergies of the combination. Each CGU or group of CGUs to which the goodwill is allocated represents the lowest level within the entity at which goodwill is monitored for internal management purposes. Goodwill is monitored at the operating segment level.

d. Foreign currency translation

- Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency").

The consolidated financial statements are presented in Indonesian Rupiah ("Rp" or "IDR"), which is the functional currency of the Company and presentation currency of the Group.

- Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the date of the transactions. As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency were adjusted to reflect the exchange rates prevailing at this date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/13 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

- **Transaksi dan saldo (lanjutan)**

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

	2022	2021	<i>Currency</i>
Mata uang Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS")	15,592	14,269	<i>United States of Dollar ("US Dollar")</i>

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Grup telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi tertentu, sesuai dengan PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Saldo dan transaksi yang material antara Grup dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia dan entitas berelasi dengan Pemerintah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Grup memilih untuk mengungkapkan transaksi dengan entitas berelasi dengan Pemerintah dengan menggunakan pengecualian dari persyaratan pengungkapan pihak berelasi.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

f. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan (jika ada).

Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya, digunakan sebagai jaminan atau yang tidak dapat digunakan secara bebas digolongkan dalam kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Foreign currency translation (continued)

- **Transactions and balances (continued)**

As at the consolidated statement of financial position dates, the exchange rates used, based on the middle rates published by Bank Indonesia, were as follows:

2022

2021

Currency
*United States of Dollar
("US Dollar")*

e. Transactions with related parties

The Group has entered into transactions with certain related parties as defined under SFAS 7 "Related Party Disclosures".

Significant transactions and balances of the Group with the Government of the Republic of Indonesia and Government-related entities are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements.

The Group elected to disclose the transaction with the Government-related entities, using the exemption from general related party disclosure requirements.

Transactions with the related parties are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of transactions between unrelated parties.

f. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with an original maturity of three months or less, net of overdrafts (if any).

Cash and cash equivalents which have been restricted for certain purposes, used for collateral or which can not be used freely are classified as restricted cash and cash equivalents.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/14 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Piutang usaha dan piutang non-usaha

Piutang usaha adalah jumlah piutang pelanggan atas penjualan batubara atau jasa yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha biasa. Piutang non-usaha adalah jumlah piutang pihak ketiga atau pihak berelasi diluar kegiatan usaha biasa. Jika penagihan diperkirakan diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi usaha biasa, jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak demikian, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi. Ketika piutang usaha atau piutang non-usaha, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Keberhasilan penagihan kembali di kemudian hari atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan pada laba rugi.

h. Aset keuangan

I. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori berikut:

- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi); dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan pinjaman.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Trade and non-trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for coal sold or services performed in the ordinary course of business. Non-trade receivables are amounts due from third or related parties for transactions outside the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade and non-trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

The amount of the impairment loss is recognised in profit or loss. When a trade or non-trade receivable for which an impairment allowance had been recognised becomes uncollectible in a subsequent period, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written-off are credited to profit or loss.

h. Financial assets

I. Classification, recognition and measurement

The Group classifies its financial assets in the following measurement categories:

- *those to be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive income, or through profit or loss); and*
- *those to be measured at amortised cost.*

The classification depends on the Group's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows are solely payment of principal and interest.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/15 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Aset keuangan (lanjutan)

**I. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran
(lanjutan)**

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Grup telah melakukan pemilihan takterbatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial assets (continued)

I. Classification, recognition and measurement (continued)

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing such assets changes.

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payments of principal and interest.

Debt instruments

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/16 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Aset keuangan (lanjutan)

**I. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran
(lanjutan)**

Instrumen utang (lanjutan)

Ada tiga kategori pengukuran dimana Grup mengklasifikasikan instrumen utangnya:

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, di mana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam beban lain-lain, bersih. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam penghasilan/(beban) lain-lain, bersih dan beban penurunan nilai pada beban lain-lain.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial assets (continued)

I. Classification, recognition and measurement (continued)

Debt instruments (continued)

There are three measurement categories into which the Group classifies its debt instruments:

- *Amortised cost: Assets that are held for the collection of contractual cash flows in cases where such cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and that is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.*
- *Fair value through other comprehensive income: Assets that are held for the collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, in cases where the assets' cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at fair value through other comprehensive income. Movements in the carrying amount are taken through other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue and foreign exchange gains and losses which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other expenses, net. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other income/(expenses), net and impairment expenses in other expenses.*

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/17 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Aset keuangan (lanjutan)

**I. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran
(lanjutan)**

Instrumen utang (lanjutan)

- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi dan disajikan bersih dalam laporan laba rugi di dalam beban lain-lain, bersih dalam periode kemunculannya.

II. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

III. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial assets (continued)

I. Classification, recognition and measurement (continued)

Debt instruments (continued)

- *Fair value through profit or loss: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or fair value through other comprehensive income are measured at fair value through profit or loss. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at fair value through profit or loss and that is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss and presented net in the statement of profit or loss within other expenses, net in the period in which it arises.*

II. Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all the risks and rewards of ownership.

III. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/18 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian ("KKE"). Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan "pendekatan yang disederhanakan" untuk mengukur KKE yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha, dan piutang non-usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan "pendekatan umum" untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan KKE termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur KKE, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

j. Persediaan batubara

Persediaan batubara merupakan batubara yang menjadi hak Grup dan dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak yang mencakup alokasi komponen tenaga kerja, penyusutan dan biaya *overhead* yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan beban penjualan.

Penyisihan persediaan batubara usang ditentukan berdasarkan estimasi penjualan persediaan pada masa mendatang.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Impairment of financial assets

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit loss ("ECL"). To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Group applies the "simplified approach" to measuring ECL which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables, non-trade receivables and contract assets without significant financing components and the "general approach" for other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since inception. The ECL reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. To measure the ECL, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

j. Coal Inventory

Coal inventory represents the Group's entitlement to coal on hand and is valued at the lower of cost or net realisable value. Cost is determined on a moving average basis, which includes an appropriate allocation of labour, depreciation and overheads related to mining activities. Net realisable value is the estimated sales amount in the ordinary course of business, less the estimated costs of completion and selling expenses.

An allowance for obsolete coal inventory is determined on the basis of estimated future usage or sale of inventory items.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/19 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

*(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Aset tetap

Pada awalnya, aset tetap diakui sebesar harga perolehan dan setelahnya dicatat pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi atas penurunan nilai. Biaya legal awal untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak didepresiasikan. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak yang bersangkutan.

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomik yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasarnya kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasarnya, Grup menerapkan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 73 "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK 16 "Aset Tetap".

Tanah tidak disusutkan. Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus hingga mencapai estimasi nilai sisa selama periode yang lebih rendah antara estimasi masa manfaat aset, umur tambang atau masa IUP sebagai berikut:

	Tahun/ Years	
Jalan pertambangan	10 - 13.5	Mining road
Bangunan	10	Buildings
Peralatan kantor	4 - 16	Office equipments
Mesin	4 - 8	Machineries
Kendaraan bermotor	4	Motor vehicle

Masa manfaat ekonomis, nilai sisa dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, jika diperlukan, setidaknya disesuaikan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

k. Fixed assets

Fixed assets are initially recognised at cost and subsequently, carried at cost less accumulated depreciation and any impairment loss. Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognised as intangible assets and amortised during the period of the land rights.

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment under SFAS 73 "Leases". If land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS 16 "Fixed Assets".

Land is not depreciated. Fixed assets, except land, are depreciated using the straight-line method to their residual values over the shorter of estimated useful lives of the assets, the life of the mine, or IUP terms as follows:

The useful lives, residual values and depreciation methods of fixed assets are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each financial year. The effects of any revisions are recognised in profit or loss when the changes arise.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/20 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pekerjaan dalam pelaksanaan

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Pekerjaan dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan. Pekerjaan dalam pelaksanaan akan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

I. Properti pertambangan

Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh atau atas nama Grup diakumulasikan secara terpisah untuk setiap *area of interest* pada saat cadangan terpulihkan yang secara ekonomis dapat diidentifikasi. Biaya tersebut termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada konstruksi tambang dan infrastruktur terkait, tidak termasuk biaya aset berwujud dan hak atas tanah yang dicatat sebagai aset tetap.

Saldo properti pertambangan diamortisasi selama umur properti menggunakan metode unit produksi sejak tanggal dimulainya operasi komersial. Amortisasi tersebut menggunakan basis estimasi cadangan. Perubahan dalam estimasi cadangan dilakukan secara prospektif, dimulai dari awal periode terjadinya perubahan.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Fixed assets (continued)

The costs of maintenance and reparments are charged to profit or loss as incurred. Subsequent costs that are incurred in order to add, replace part of, or service an assets are recognised as assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognised on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that is determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when the item is derecognised.

Construction in progress

Construction in progress represents costs directly attributable to the construction of fixed costs. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction. Construction in progress is transferred to a fixed asset account when completed and ready for use. Depreciation is charged from the date on which the assets are ready for use in the manner intended by management.

I. Mining properties

Development expenditure incurred by or on behalf of the Group is accumulated separately for each area of interest in which economically recoverable resources have been identified. Such expenditure comprises costs directly attributable to the construction of a mine and the related infrastructure and excludes physical assets and land rights which are recorded as fixed assets.

The balance of mining properties is amortised over the life of the property using the units-of-production method from the date of the commencement of commercial operations. The amortisation is based on estimated reserves. Changes in estimated reserves are accounted for on a prospective basis, from the beginning of the period in which the change occurs.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/21 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Properti pertambangan (lanjutan)

Ketika keputusan pengembangan telah diambil, jumlah tercatat aset eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* tertentu dipindahkan sebagai “pertambangan yang sedang dikembangkan” pada akun properti pertambangan dan digabung dengan pengeluaran biaya pengembangan yang terjadi setelahnya.

“Pertambangan yang sedang dikembangkan” direklasifikasi ke “pertambangan yang berproduksi” pada akun properti pertambangan pada akhir tahap komisioning, ketika tambang tersebut mampu beroperasi sesuai dengan rencana manajemen. “Pertambangan yang sedang dikembangkan” tidak diamortisasi sampai direklasifikasi menjadi “pertambangan yang berproduksi”.

Ketika timbul biaya pengembangan lebih lanjut atas properti pertambangan setelah dimulainya produksi, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai bagian dari “pertambangan yang berproduksi” apabila terdapat kemungkinan besar tambahan manfaat ekonomi masa depan sehubungan dengan biaya tersebut akan mengalir ke Grup. Apabila tidak, biaya tersebut dibebankan sebagai biaya produksi.

“Pertambangan yang berproduksi” (termasuk biaya eksplorasi, evaluasi dan pengembangan, serta pembayaran untuk memperoleh hak penambangan dan sewa) diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi, dengan perhitungan terpisah yang dibuat untuk setiap *area of interest*. “Pertambangan yang berproduksi” dideplesi menggunakan metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti dan cadangan terduga.

Properti pertambangan diuji penurunan nilainya dengan mengacu pada kebijakan akuntansi pada Catatan 2m.

m. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Untuk tujuan menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi (unit penghasil kas).

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Mining properties (continued)

Once a development decision has been taken, the carrying amount of the exploration and evaluation assets in respect of the area of interest is transferred to “mines under development” within mining properties and aggregated with the subsequent development expenditure.

“Mines under development” are reclassified as “mines in production” within mining properties at the end of the commissioning phase, when the mine is capable of operating in the manner intended by management. No amortisation is recognised for “mines under development” until they are reclassified to “mines in production”.

When further development expenditure is incurred on a mining property after the commencement of production, the expenditure is carried forward as part of “mines in production” when it is probable that additional future economic benefits associated with the expenditure will flow to the Group. Otherwise, such expenditure is classified as a cost of production.

“Mines in production” (including reclassified exploration, evaluation and development expenditure, and payments to acquire mineral rights and leases) are amortised using the units-of-production method, with separate calculations being made for each area of interest. “Mines in production” will be depleted using a units-of-production method on the basis of proven and probable reserves.

Mining properties are tested for impairment in accordance with the policy described in Note 2m.

m. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life are not subject to amortisation but are tested annually for impairment or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset’s carrying value exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset’s fair value less costs to sell and its value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash flows (cash generating units).

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/22 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

*(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Aset non-keuangan, selain *goodwill*, yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pemulihan rugi penurunan nilai untuk aset selain *goodwill*, diakui jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali dilakukan. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

Beban penurunan nilai dan pemulihan disajikan secara terpisah dalam laba rugi, setelah penyajian laba bruto.

n. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha biasa. Utang lain-lain adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok di luar kegiatan usaha biasa. Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

o. Pinjaman

Pada awalnya, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksinya. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Impairment of non-financial assets (continued)

Non-financial assets, other than goodwill, that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill would be recognised, if and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss. The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognised as the date of which the impairment was reversed. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

Impairment charges and reversals are disclosed in a separate line item within profit or loss, below the gross profit line.

n. Trade and other payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Other payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired out of the ordinary course of business. Trade and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

o. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently stated at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowing using the effective interest method.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/23 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

*(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Pinjaman (lanjutan)

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan, sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya ditangguhkan sampai penarikan terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya-biaya ini dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

p. Biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diatribusikan dengan akuisisi, konstruksi atau produksi aset kualifikasi, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut sampai aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual. Untuk pinjaman yang dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasi, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasi, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset kualifikasi. Entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substantial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasi telah selesai.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Borrowings (continued)

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facilities will be drawn down. In this case, the fee is deferred until drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a prepayment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

p. Borrowing costs

Interest and other borrowing costs which are either directly or indirectly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalised as part of the cost of that asset until such time as the asset is substantially ready for its intended use or sale. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing costs incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying asset. An entity shall cease capitalising borrowing costs when substantially all of the activities necessary to prepare the qualifying assets have been completed.

All other borrowing costs are recognised in profit or loss in the period in which they are incurred.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/24 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Kewajiban lingkungan

Pemulihan, rehabilitasi dan biaya lingkungan yang berkaitan dengan pemulihan atas area yang terganggu selama tahap produksi dibebankan pada beban pokok pendapatan pada saat kewajiban dari pemulihannya atas area yang terganggu tersebut selama penambangan.

Kewajiban ini diakui sebagai liabilitas pada saat timbulnya kewajiban hukum atau konstruktif yang berasal dari aktivitas yang telah dilaksanakan. Kewajiban ini diukur pada saat dan setelah pengakuan sebesar nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Perubahan pada pengukuran kewajiban yang timbul selama tahap produksi juga dibebankan sebagai beban pokok pendapatan, sementara peningkatan kewajiban yang sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

Provisi dibentuk untuk kegiatan-kegiatan pasca tambang yang terkait dengan aset-aset yang ditinggalkan dan dibongkar sehubungan dengan kewajiban hukum berkaitan dengan penarikan aset tambang terkait dan aset berumur panjang lainnya termasuk pembongkaran bangunan, peralatan, sistem *crushing* dan *handling*, infrastruktur, dan fasilitas lainnya yang berasal dari pembelian, konstruksi atau pengembangan aset. Kewajiban ini diakui sebagai liabilitas pada saat timbulnya kewajiban hukum atau konstruktif yang berkaitan dengan penarikan sebuah aset, dengan pengukuran pada saat dan setelah pengakuan sebesar nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut.

Biaya penarikan aset dalam jumlah yang setara dengan jumlah liabilitas tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari aset terkait dan kemudian disusutkan atau dideplesi selama masa manfaat aset tersebut. Peningkatan kewajiban yang sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Environmental obligations

Restoration, rehabilitation and environmental expenditure to be incurred in relation to the remediation of areas disturbed during the production phase are charged to cost of revenue as the obligation arises from the disturbance as extraction progresses.

These obligations are recognised as liabilities when a legal or constructive obligation has arisen from activities which have already been performed. This obligation is initially and subsequently measured at the present value of the expenditure expected to be required to settle the obligation using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation. Changes in the measurement of a liability which arises during production are also charged to the cost of revenue, while the increase in the provision due to the passage of time is recognised as finance expenses.

A provision for the decommissioning of mining assets and related post-mining activities as well as the abandonment and decommissioning of other long-lived assets is provided for the legal obligations associated with the retirement of mining related assets and other long lived assets including the decommissioning of such assets that resulted from the acquisition, construction or development of such assets. These obligations are recognised as liabilities when a legal or constructive obligation is incurred with respect to the retirement of an asset, with the initial and subsequent measurement of the obligation at the present value of the expenditure which is expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation.

An asset retirement cost equivalent to these liabilities is capitalised as part of the related asset's carrying value and is subsequently depreciated or depleted over the asset's useful life. The increase in these obligations due to the passage of time is recognised as finance expenses.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/25 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2022

*(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Kewajiban lingkungan (lanjutan)

Perubahan dalam pengukuran kewajiban purna operasi yang timbul dari perubahan estimasi waktu atau jumlah pengeluaran sumber daya ekonomis (contohnya: arus kas) yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, atau perubahan dalam tingkat diskonto, akan ditambahkan pada atau dikurangkan dari, harga perolehan aset yang bersangkutan pada tahun berjalan.

Jumlah yang dikurangkan dari harga perolehan aset tidak boleh melebihi jumlah tercatatnya. Jika penurunan dalam liabilitas melebihi nilai tercatat aset, kelebihan tersebut segera diakui dalam laba rugi. Jika penyesuaian tersebut menghasilkan penambahan pada harga perolehan aset, Grup akan mempertimbangkan apakah hal ini mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset yang baru mungkin tidak bisa dipulihkan secara penuh. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup akan melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset tersebut dengan melakukan estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan dan akan mencatat kerugian dari penurunan nilai, jika ada.

r. Sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan dan jika telah ditentukan sebelumnya:
 1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Environmental obligations (continued)

The changes in the measurement of decommissioning obligations that result from changes in the estimated timing or amount of any outflow of resources embodying economic benefits (e.g. cash flow) required to settle the obligations, or a change in the discount rate will be added to or deducted from, the cost of the related asset in the current year.

The amount deducted from the cost of the asset should not exceed its carrying amount. If a decrease in the liability exceeds the carrying amount of the asset, the excess is recognised immediately in profit or loss. If the adjustment results in an addition to the cost of an asset, the Group will consider whether this is an indication that the new carrying amount of the asset may not be fully recoverable. If there is any such indication, the Group will test the asset for impairment by estimating its recoverable amount and will record the impairment loss incurred, if any.

r. Leases

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

- *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used and if the use is predetermined:*
 1. *The Group has the right to operate the asset, or*
 2. *The Group has designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose it will be used.*

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/26 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Sewa (lanjutan)

Pada tanggal inisiasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Utang sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa pembiayaan". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Leases (continued)

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone prices of the non-lease components.

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the incremental borrowing rate.

Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability are the fixed payments, including in-substance fixed payments, less any lease incentive receivable.

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in "finance lease liabilities". The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/27 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2022

*(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Sewa (lanjutan)

Grup menyajikan aset hak-guna dan liabilitas sewa sebagai akun terpisah di dalam laporan posisi keuangan.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa jangka-pendek

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasi;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasi;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisi menggunakan tingkat diskonto revisi berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisi ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal efektif modifikasi;

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. *Leases (continued)*

The Group presents right-of-use assets and lease liabilities as separate line items in the statement of financial position.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Short-term leases

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Lease modification

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if both:

- *the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
- *the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- *remeasures and allocates the consideration in the modified contract;*
- *determines the lease term of the modified lease;*
- *remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/28 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Sewa (lanjutan)

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

s. Modal saham

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

t. Pengakuan pendapatan dan beban

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

- i. identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- ii. identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
- iii. penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
- iv. alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Leases (continued)

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- *decreases the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognises in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
- *makes a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

s. Share capital

Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

t. Revenue and expense recognition

Revenue recognition must fulfill five steps of assessment:

- i. *identify contract(s) with a customer;*
- ii. *identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;*
- iii. *determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;*
- iv. *allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct good or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin; and*

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/29 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

- v. pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Penjualan batubara

Pendapatan penjualan diakui pada setiap penjualan individu ketika pengendalian berpindah ke pelanggan. Pengendalian beralih ke pelanggan dan pendapatan penjualan diakui ketika produk dimuat ke kapal dimana batubara akan dikirim ke pelabuhan tujuan atau tempat pelanggan.

Grup menjual batubara dengan syarat *Free on Board* ("FOB"), di mana Grup tidak memiliki tanggung jawab untuk pengangkutan atau asuransi setelah kontrol barang telah berlalu di pelabuhan muat. Untuk jangka waktu ini hanya ada satu kewajiban pelaksanaan, yaitu untuk penyediaan produk pada titik di mana kontrol lewat. Selain itu juga, Grup menjual batubara dengan syarat *Cost, Insurance and Freight* ("CIF"), tetapi berdasarkan perjanjian penjualan, kepemilikan dan risiko kerugian atas batubara akan tetap berada pada Grup sampai batubara melewati pelabuhan bongkar.

Oleh karena itu, Grup menganggap bahwa biaya asuransi dan pengangkutan bukan merupakan kewajiban pelaksanaan terpisah melainkan satu kesatuan dengan kewajiban pelaksanaan dengan penjualan batubara dikarenakan kontrol atas persediaan batubara berpindah ke pembeli pada saat batubara tersebut sudah sampai di lokasi pembeli. Oleh karena itu Grup tidak memiliki kewajiban pelaksanaan terpisah untuk jasa pengangkutan dan asuransi yang disediakan.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Revenue and expense recognition (continued)

- v. recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring a promised good or service to a customer (which is when the customer obtains control of that good or service).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

Sales of coal

Sales revenue is recognised on each individual sale when control transfers to the customer. Control passes to the customer and sales revenue is recognised when the product is loaded onto the vessel on which the coal will be shipped to the destination port or the customer's premises.

The Group generally sells its coal products under Free on Board ("FOB") terms, where the Group has no responsibility for freight or insurance once control of the goods has passed at the loading port. For this term there is only one performance obligation, being for provision of product at the point where control passes. In addition, the Group also sells coal under Cost, Insurance and Freight ("CIF") terms, but under the sales agreement, the title and risk of loss of coal shall remain with the Group until such coal passes at the discharging port.

As such, the Group considers that the insurance and freight costs are not separate performance obligations but one performance obligation with the sale of coal due to the control over coal supplies passing to the buyer when the coal has arrived at the buyer's location. Accordingly, the Group does not have any separate performance obligations for the transportation and insurance services provided.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/30 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

u. Pajak penghasilan kini dan tangguhan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di rugi komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam rugi komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, di negara di mana Grup beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan ("SPT") Tahunan sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas yang sama.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Revenue and expense recognition (continued)

Expenses

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

u. Current and deferred income tax

The tax expense comprised current and deferred taxes. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive loss or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive loss or directly in equity, respectively.

The current income tax is calculated on the basis of the tax laws enacted at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income. Management periodically evaluates the positions taken in the annual tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at the reporting period end and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on the same taxable entity.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/31 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang nilai aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari direview secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi periode tersebut.

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2, Grup telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Grup mempunyai beberapa perjanjian sewa di mana Grup bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Grup mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan dari aset sewaan yang dialihkan kepada berdasarkan PSAK 73, yang mensyaratkan Grup untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait atas kepemilikan aset sewaan.

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 2, the management is required to make judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical judgements in applying accounting policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 2, the Group has identified the following matters under which significant judgements are made:

Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

The Group has various lease agreements where the Group acts as a lessee in respect of certain assets. The Group evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased asset are transferred to the lessee based on SFAS 73, which requires the Group to make judgements and estimates of transfer of risks and rewards of ownership of the leased asset.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/32 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Sewa (lanjutan)

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Grup memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES (continued)

Critical judgements in applying accounting policies (continued)

Leases (continued)

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates. In determining the incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

Income taxes

The calculations of income tax expense for the Group requires judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgements and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/33 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Pajak penghasilan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

Sumber ketidakpastian estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Provisi atas KKE piutang usaha dan aset keuangan lainnya

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung KKE piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa (misalnya berdasarkan geografi, tipe produk, tipe dan/atau peringkat pelanggan, dan bentuk lain).

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Grup yang diobservasi. Grup akan memperbarui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika perkiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbarui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, perkiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES (continued)

Critical judgements in applying accounting policies (continued)

Income taxes (continued)

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The Assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by the level of sales and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

Sources of estimation uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, which have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are discussed below:

Provision for ECL of trade receivables and other financial assets

The Group uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics (e.g., by geography, product type, customer type and/or rating and other matters).

The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates and forecast economic conditions and ECL is a significant estimate. The amount of ECL is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of a customer's actual default in the future.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/34 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Estimasi cadangan

Cadangan merupakan estimasi jumlah produk yang dapat diekstraksi secara ekonomis dan legal dari area kontrak. Grup menentukan dan melaporkan cadangan batubara berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *statement of Open Cut Coal Resources and Reserves* dan hasil survei internal Grup. Dalam memperkirakan cadangan batubara diperlukan beberapa asumsi seperti faktor geologi, teknis dan ekonomi, termasuk jumlah, teknik produksi, rasio pengupasan tanah, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas dan nilai tukar mata uang.

Dalam memperkirakan jumlah dan/atau nilai kalori cadangan batubara memerlukan ukuran, bentuk dan kedalaman batubara atau lahan yang ditentukan dengan menganalisis data geologis seperti sampel pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan pertimbangan geologis yang kompleks dan sulit dalam menginterpretasikan data.

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari tahun ke tahun dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan dapat berubah dari tahun ke tahun.

Perubahan cadangan dilaporkan dapat mempengaruhi hasil keuangan Grup dan posisi keuangan dalam berbagai cara, termasuk berikut:

- Nilai tercatat aset mungkin akan terpengaruh karena perubahan perkiraan arus kas masa depan;
- Penyusutan, deplesi dan amortisasi dibebankan ke laporan laba rugi dapat berubah dimana biaya tersebut ditentukan berdasarkan metode unit produksi atau di mana masa manfaat ekonomi dari perubahan aset;
- Penyisihan penutupan tambang bisa berubah di mana perubahan dalam estimasi cadangan mempengaruhi harapan tentang waktu atau biaya kegiatan tersebut; dan
- Nilai tercatat aset pajak tangguhan/kewajiban dapat berubah karena perubahan estimasi dari kemungkinan atas pemulihian manfaat pajak.

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES (continued)

Sources of estimation uncertainty (continued)

Reserve estimates

Reserves are estimates of the amount of product that can be economically and legally extracted from the contract areas. The Group determines and reports its coal reserves under the principles incorporated in the statement of Open Cut Coal Resources and Reserves and the Group's internal survey. In order to estimate coal reserves, assumptions are required about a range of geological, technical and economic factors, including quantities, production techniques, stripping ratio, production costs, transport costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates.

Estimating the quantity and/or calorific value of coal reserves requires the size, shape and depth of coal bodies or fields to be determined by analysing geological data such as drilling samples. This process may require complex and difficult geological judgements to interpret the data.

Because the economic assumptions used to estimate reserves change from year to year and because additional geological data is generated during the course of operations, estimates of reserves may change from year to year.

Changes in reported reserves may affect the Group financial results and financial position in a number of ways, including the following:

- Asset's carrying amounts may be affected due to changes in the estimated future cash flows;
- Depreciation, depletion and amortisation charged to profit or loss may change where such charges are determined based on a unit of production method or where the economic useful lives of assets change;
- Provision for mine closure may change where changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities; and
- The carrying amounts of deferred tax assets/liabilities may change due to changes in estimates of the likelihood of the recoverability of the tax benefits.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/35 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang

Kebijakan akuntansi Grup dalam pengakuan nilai provisi untuk reklamasi lingkungan dan penutupan tambang membutuhkan estimasi dan asumsi yang signifikan, seperti persyaratan hukum dan regulasi yang relevan, serta waktu, cakupan dan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan perbedaan atas biaya aktual di masa mendatang dengan jumlah yang dicadangkan saat ini.

Pencadangan yang diakui untuk setiap lokasi ditinjau dan diperbarui secara berkala berdasarkan pada fakta dan keadaan pada saat itu. Saldo penyisihan ini dicatat sebagai bagian dari "provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang".

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap yang dimiliki Grup ditentukan berdasarkan periode aset tersebut diharapkan masih dapat digunakan. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direview secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset.

Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi setiap periode pelaporan untuk menentukan apakah ada indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, estimasi jumlah yang dapat dipulihkan akan dilakukan dan kerugian penurunan nilai akan diakui sejauh jumlah tercatat melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Jumlah yang dapat dipulihkan kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur pada nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai.

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES (continued)

Sources of estimation uncertainty (continued)

Provision for environmental reclamation and mine closure

The Group accounting policy for the recognition of provision for environmental reclamation and mine closure requires significant estimates and assumptions, such as requirements of the relevant legal and regulatory framework, and the timing, extent and costs of required environmental and reclamation activity. These uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided.

The provision recognised for each location is periodically reviewed and updated based on the facts and circumstances available at that time. The balance of the provision is recorded as part of "provision for environmental reclamation and mine closure".

Estimated useful lives of fixed assets

The useful life of each item of the Group's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of fixed assets would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of fixed assets.

Impairment of non-financial assets

In accordance with the Group's accounting policy, each asset or cash generating unit is evaluated every reporting period to determine whether there is any indication of impairment. If any indication exists, a formal estimate of the recoverable amount is performed and an impairment loss is recognised to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash generating group of assets is measured at the higher of the fair value less costs to sell or value in use.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/36 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tentang ekspektasi produksi dan volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), cadangan (lihat 'estimasi cadangan'), biaya operasi, biaya penutupan dan rehabilitasi serta belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini memiliki risiko dan ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan situasi akan mengubah proyeksi ini, yang selanjutnya dapat mempengaruhi jumlah aset yang dapat dipulihkan. Dalam keadaan seperti itu, beberapa atau semua aset mungkin akan mengalami penurunan nilai atau biaya penurunan nilai dikurangi dengan dampak yang dicatat dalam laba rugi.

Sebagai alternatif, ditengah keterbatasan informasi mengenai nilai dari aset yang dimiliki pada pasar langsung yang dapat diobservasi, nilai yang dapat dipulihkan dapat diestimasi berdasarkan transaksi serupa terkini atau transaksi potensial yang melibatkan aset atau unit penghasil kas yang serupa.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES (continued)

Sources of estimation uncertainty (continued)

Impairment of non-financial assets (continued)

The determination of fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about expected production and sales volumes, commodity prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), reserves (see 'reserve estimates'), operating costs, closure and rehabilitation costs and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty, hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amounts of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired or the impairment charges reduced with the impact recorded in profit or loss.

Alternatively, in the absence of directly observable market prices for our assets, the recoverable amount may be estimated based on recent comparable transactions or other potential transactions involving a comparable asset or cash generating unit.

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2022	2021	
Kas	86	-	<i>Cash on hand</i>
Kas di bank - Rupiah			<i>Cash in banks - Rupiah</i>
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	328,514	637,490	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	228,726	167,507	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	81,377	1,116	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
	638,617	806,113	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	442	220	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT Bank KB Bukopin Tbk.	96	96	PT Bank KB Bukopin Tbk.
	538	316	
	639,241	806,429	

Lihat Catatan 20 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 20 for details of related party transactions.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/37 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA

5. TRADE RECEIVABLES

	2022	2021	
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PLN	618,204	562,350	PLN
PT Shenhua Guohua PJB ("SGPJB")	91,170	123,460	PT Shenhua Guohua PJB ("SGPJB")
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam")	41,156	70,644	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam")
PIP	38,259	92,849	PIP
PNP	18,477	287,359	PNP
	<u>807,266</u>	<u>1,136,662</u>	
Pihak ketiga	<u>209,824</u>	<u>54,324</u>	<i>Third parties</i>
	<u>1,017,090</u>	<u>1,190,986</u>	

Analisis umur piutang usaha yang belum jatuh tempo atau lewat jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Aging analysis of trade receivables not yet overdue or overdue but not impaired is as follows:

	2022	2021	
Lancar	992,903	1,190,986	<i>Lancar</i>
Lewat jatuh tempo:			<i>Overdue:</i>
1 - 30 hari	13,631	-	1 – 30 days
31 - 60 hari	3,851	-	31 – 60 days
> 60 hari	6,705	-	> 60 days
	<u>1,017,090</u>	<u>1,190,986</u>	

Berdasarkan penilaian manajemen terhadap penyisihan KKE atas piutang usaha, manajemen berpendapat bahwa penyisihan KKE tidak material, sehingga penyisihan KKE tidak diperlukan.

Based on management's assessment of the allowance for ECL on trade receivables, management is of the opinion that the allowance for ECL is not material, therefore, the allowance for ECL is not necessary.

Lihat Catatan 20 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 20 for details of related party transactions.

6. PIUTANG NON-USAHA

6. NON-TRADE RECEIVABLES

	2022	2021	
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PLN	145,241	-	PLN
PIP	56,161	-	PIP
PNP	6,243	-	PNP
	<u>207,645</u>	<u>-</u>	
Pihak ketiga	<u>542,638</u>	<u>490,292</u>	<i>Third parties</i>
	<u>750,283</u>	<u>490,292</u>	
Dikurangi: bagian lancar	<u>(207,645)</u>	<u>-</u>	<i>Less: current portion</i>
Bagian tidak lancar	<u>542,638</u>	<u>490,292</u>	<i>Non-current portion</i>
Piutang non-usaha - pihak berelasi terutama terdiri atas piutang dari penugasan PLN untuk jasa transportasi batubara.			<i>Non-trade receivables - related party mainly consist of receivables from PLN assignment for coal transportation service.</i>

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/38 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

*(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)*

6. PIUTANG NON-USAHA (lanjutan)

Piutang non-usaha - pihak ketiga termasuk saldo sebesar Rp477.356 yang merupakan uang muka pengikatan pembelian batubara yang dibayarkan oleh Grup kepada PT Tansri Madjid Energy ("TME"). Transaksi tersebut dianggap merugikan Negara dan uang muka tersebut telah disetorkan kembali oleh mendiang Kokos Jiang selaku Direktur Utama TME pada tahun 2019 kepada Kas Negara.

Manajemen berkeyakinan bahwa uang yang telah disetorkan kembali kepada Kas Negara tersebut akan dapat dikembalikan kepada Grup berdasarkan surat dari Inspektorat V dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tertanggal 24 Oktober 2022 mengenai penyampaian penjelasan terkait Mekanisme Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Rangka Mendukung Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Perusahaan.

Berdasarkan penilaian manajemen terhadap penyisihan KKE atas piutang non-usaha, manajemen berpendapat bahwa penyisihan KKE tidak material, sehingga penyisihan KKE tidak diperlukan.

Lihat Catatan 20 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

6. NON-TRADE RECEIVABLES (continued)

Non-trade receivables - third parties include balances amounted Rp477,356 which represents advances paid by the Group for coal binding agreements with PT Tansri Madjid Energy ("TME"). The transactions considered causing loss to the State and these advances have already been deposited back by the late Kokos Jiang as President Director of TME in 2019 to the State Treasury.

Management believes that the advances which have been deposited back to the State Treasury will be returned to the Group based on a letter from Inspectorate V from the Inspectorate General of the Ministry of Finance dated 24 October 2022 regarding the Returning Mechanism of Non-Tax State Revenues as a Result of Following-Up Supreme Audit Agency of Republic of Indonesia recommendations to the Company.

Based on management's assessment of the allowance for ECL on non-trade receivables, management is of the opinion that the allowance for ECL is not material, therefore, the allowance for ECL is not necessary.

Refer to Note 20 for details of related party transactions.

7. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

7. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

	2022	2021	
Uang muka pembelian dan pengangkutan batubara	-	32,110	<i>Advances for coal purchased and transportation</i>
Lainnya	11,036	43,500	<i>Others</i>
	<u>11,036</u>	<u>75,610</u>	
Dikurangi: bagian lancar	(11,036)	(32,110)	<i>Less: current portion</i>
Bagian tidak lancar	<u>-</u>	<u>43,500</u>	<i>Non-current portion</i>

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/39 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. PROPERTI PERTAMBANGAN

8. MINING PROPERTIES

	2022						
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Pengukuran kembali/ <i>Remeasurement</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Harga perolehan							
Pertambangan yang sedang dikembangkan	376,867	924	-	-	-	377,791	<i>Acquisition costs Mines under development</i>
Pertambangan yang berproduksi	1,624,993	-	-	-	-	1,624,993	<i>Mines in production</i>
	2,001,860	924	-	-	-	2,002,784	
Akumulasi amortisasi							<i>Accumulated amortisation</i>
Pertambangan yang berproduksi	(104,209)	(41,514)	-	-	-	(145,723)	<i>Mines in production</i>
Nilai buku bersih	1,897,651					1,857,061	<i>Net book value</i>
	2021						
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Pengukuran kembali/ <i>Remeasurement</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Harga perolehan							
Pertambangan yang sedang dikembangkan	292,007	363	(26,708)	-	111,205	376,867	<i>Acquisition costs Mines under development</i>
Pertambangan yang berproduksi	1,658,468	-	-	(33,475)	-	1,624,993	<i>Mines in production</i>
	1,950,475	363	(26,708)	(33,475)	111,205	2,001,860	
Akumulasi amortisasi							<i>Accumulated amortisation</i>
Pertambangan yang berproduksi	(72,216)	(31,993)	-	-	-	(104,209)	<i>Mines in production</i>
Nilai buku bersih	1,878,259					1,897,651	<i>Net book value</i>

Pada tahun 2021, Grup melakukan reklasifikasi atas pembebasan lahan sebesar Rp111.205 yang sebelumnya dicatat sebagai tanah di aset tetap ke properti pertambangan. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan fakta dan keadaan atas tanah tersebut.

In 2021, the Group reclassified land clearing amounted to Rp111,205 which recognised as land in fixed assets to mining properties. The reclassification was based on the facts and circumstances of the related land.

Pada tahun 2021, pengukuran kembali atas properti pertambangan sebesar Rp33.475 diakibatkan karena BKL mengubah mata uang fungsional dan presentasinya dari Dolar AS menjadi Rupiah.

In 2021, remeasurement of mining properties amounted to Rp33,475 was due to BKL changed the functional and presentation currency from US Dollar to Rupiah.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai atas properti pertambangan.

As at 31 December 2022 and 2021, management believes that there was no impairment in the value of mining properties.

Lihat Catatan 25 terkait pencabutan IUP milik MAP dan PBI.

See Note 25 related to revocation of IUP of MAP and PBI.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/40 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Rincian investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut

9. INVESTMENT IN ASSOCIATES

Details of investments in associates are as follows:

Entitas/Entity	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Tahun operasi komersial/ Commercial operation	Percentase penyertaan/ Percentage of ownership	
				31 Desember/ December 2022	31 Desember/ December 2021
PT Musi Mitra Jaya ("MMJ")	Palembang	Infrastruktur batubara/ Coal infrastructure	2011	25.60%	25.60%
PT Sriwijaya Bara Logistic ("SBL")	Musi Banyuasin	Infrastruktur batubara/ Coal infrastructure	2014	25.60%	25.60%

Mutasi investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The changes in investments in associate are as follows:

	Saldo awal/ Beginning balance	Bagian atas laba bersih/ Share in net profit	Bagian atas pendapatan komprehensif lain/Share of other comprehensive income	Amortisasi/ Amortisation	Saldo akhir/ Ending Balance	2022
						MMJ SBL
2022	246,791 323,290	14,460 14,407	3,058 6,891	(7,631) (8,843)	256,678 335,745	
	570,081	28,867	9,949	(16,474)	592,423	
2021	248,334 326,949	5,887 4,486	201 698	(7,631) (8,843)	246,791 323,290	
	575,283	10,373	899	(16,474)	570,081	2021 MMJ SBL

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi pada 31 Desember 2022 dan 2021 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

The following table contains the summarised financial information for associates as at 31 December 2022 and 2021 which are accounted for using the equity method.

	2022		
	SBL	MMJ	
Jumlah aset	640,564	962,303	Total assets
Jumlah liabilitas	(296,262)	(794,375)	Total liabilities
Aset bersih	344,302	167,928	Net assets
% kepemilikan efektif	25.6%	25.6%	% effective ownership
Bagian Grup atas aset bersih asosiasi	88,141	42,990	The Group's share of the net assets of associates
Penyesuaian metode ekuitas	265,290	228,950	Adjustments of equity methods
Amortisasi kenaikan nilai wajar	(17,686)	(15,262)	Amortisation of fair value uplift
Jumlah tercatat	335,745	256,678	Total carrying value
Jumlah pendapatan	182,301	237,817	Total revenue
Jumlah laba tahun berjalan	56,278	56,483	Total income for the year
Jumlah laba komprehensif lain	26,918	11,944	Total other comprehensive income
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	83,196	68,427	Total comprehensive income for the year

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/41 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

9. INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)

	2021		
	SBL	MMJ	
Jumlah aset	539,591	792,483	Total assets
Jumlah liabilitas	<u>(278,482)</u>	<u>(692,985)</u>	Total liabilities
Aset bersih	261,109	99,498	Net assets
% kepemilikan efektif	25.6%	25.6%	% effective ownership
Bagian Grup atas aset bersih asosiasi	66,843	25,472	The Group's share of the net assets of associates
Penyesuaian metode ekuitas	265,290	228,950	Adjustments of equity methods
Amortisasi kenaikan nilai wajar	<u>(8,843)</u>	<u>(7,631)</u>	Amortisation of fair value uplift
Jumlah tercatat	323,290	246,791	Total carrying value
Jumlah pendapatan	81,244	111,369	Total revenue
Jumlah laba tahun berjalan	17,525	22,996	Total income for the year
Jumlah laba komprehensif lain	<u>2,727</u>	<u>784</u>	Total other comprehensive income
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	<u>20,252</u>	<u>23,780</u>	Total comprehensive income for the year

Seluruh entitas asosiasi dicatat oleh Grup dengan menggunakan metode ekuitas. Seluruh entitas adalah entitas tertutup dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk sahamnya.

All the associates are recorded by the Group using the equity method. They are private entities and there is no quoted market price available for its share.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat pembatasan dan risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada entitas asosiasi. Manajemen juga meyakini bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai.

As at 31 December 2022 and 2021, management believes that there is no restriction and significant risk regarding the investments in associates. Management also believes that there is no indication of impairment.

10. UTANG USAHA

10. TRADE PAYABLES

	2022	2021	
Pihak berelasi			Related parties
SBL	3,585	9,783	SBL
MMJ	<u>2,880</u>	<u>6,917</u>	MMJ
	6,465	16,700	
Pihak ketiga	<u>1,121,740</u>	<u>1,762,722</u>	Third parties
	<u>1,128,205</u>	<u>1,779,422</u>	

Lihat Catatan 20 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 20 for details of related party transactions.

11. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

11. ACCRUED EXPENSES

	2022	2021	
Pengangkutan dan analisis batubara	355,524	389,074	Transport and analysis of coal
Jasa profesional	25,096	10,560	Professional fees
Bonus dan insentif prestasi kerja	22,482	30,886	Bonus and performance incentives
Lain-lain	<u>24,487</u>	<u>14,701</u>	Others
	<u>427,589</u>	<u>445,221</u>	

Lihat Catatan 20 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 20 for details of related party transactions.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/42 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. UTANG LAIN-LAIN

12. OTHER PAYABLES

	2022	2021	
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PLN	114,890	137,200	PLN
SBL	1,948	1,948	SBL
	<u>116,838</u>	<u>139,148</u>	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
PT Atlas Resources Tbk	138,450	138,450	PT Atlas Resources Tbk
PT Selaras Indah Pratama	87,377	87,340	PT Selaras Indah Pratama
PT Energi Prima Karunia	27,710	27,694	PT Energi Prima Karunia
PT Prima Multi Artha	27,189	27,179	PT Prima Multi Artha
	<u>280,726</u>	<u>280,663</u>	
	<u>397,564</u>	<u>419,811</u>	
Dikurangi: bagian jangka pendek	<u>(342,665)</u>	<u>(277,598)</u>	<i>Less: current portion</i>
Bagian jangka panjang	<u>54,899</u>	<u>142,213</u>	<i>Non-current portion</i>

PT Atlas Resources Tbk

Pinjaman dari PT Atlas Resources Tbk merupakan pinjaman untuk tujuan operasional BKL. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga dan sudah dibayarkan 50% atau sebesar Rp138.450, dimana sebagian dilaksanakan melalui mekanisme saling hapus dan sisa 50% akan dibayarkan pada saat pasokan batubara BKL mencapai 2.500.000 MT. Grup mengkategorikan pinjaman ini sebagai liabilitas jangka pendek.

PT Atlas Resources Tbk

Loan to PT Atlas Resources Tbk represents loan for operational purposes of BKL. This loan bears no interest and has been paid 50% or Rp138,450 of which part is carried out through an offsetting mechanism and the remaining 50% will be paid when the coal supply of BKL reaches 2,500,000 MT. The Group categorised this loan as current liabilities.

PT Selaras Indah Pratama

Pinjaman kepada PT Selaras Indah Pratama berdasarkan perjanjian novasi antara BKL, PT Atlas Resources Tbk, dan PT Selaras Indah Pratama pada tanggal 9 Januari 2019. Pinjaman ini bertujuan untuk kepentingan operasi BKL. Pinjaman ini tidak berbunga dan tidak memiliki tanggal pembayaran kembali. Grup mengkategorikan pinjaman ini sebagai liabilitas jangka pendek.

PT Selaras Indah Pratama

Loan to PT Selaras Indah Pratama was based on novation agreement between BKL, PT Atlas Resources Tbk, and PT Selaras Indah Pratama. This loan represents loan for operational purposes of BKL. This loan bears no interest and has no fixed repayment date. The Group categorised this loan as current liabilities.

PT Energi Prima Karunia dan PT Prima Multi Artha

Pinjaman dari PT Energi Prima Karunia dan PT Prima Multi Artha adalah pinjaman PBI untuk pembelian tanah. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 0,3% dan akan jatuh tempo pada tahun 2028. Grup mengkategorikan pinjaman ini sebagai liabilitas jangka panjang.

PT Energi Prima Karunia and PT Prima Multi Artha

Loan to PT Energi Prima Karunia and PT Prima Multi Artha is PBI's loan for land purchase. This loan bears interest at 0.3% and will be due in 2028. The Group categorised this as non-current portion liabilities.

Lihat Catatan 20 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 20 for details of related party transactions.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/43 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PINJAMAN PEMEGANG SAHAM

13. SHAREHOLDER LOAN

	2022	2021	
PLN	788,417	1,025,887	<i>PLN</i> <i>Changes in fair value of shareholder loan</i>
Perubahan nilai wajar pinjaman pemegang saham	<u>(160,496)</u>	<u>(324,875)</u>	
	627,921	701,012	
Dikurangi: bagian jangka pendek	<u>(78,129)</u>	<u>(158,752)</u>	<i>Less: current portion</i>
Bagian jangka panjang	<u>549,792</u>	<u>542,260</u>	<i>Non-current portion</i>
Pinjaman kepada pemegang saham digunakan untuk kegiatan investasi Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:			<i>Shareholder loan used for the Company's investment activities, with detail as follows:</i>
Investasi/Investment	2022	2021	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum
Pembangkit Listrik Tenaga Uap ("PLTU") MT Jambi 1	423,694	553,363	0.3%
Joint-Operation ("JO") Sumatera	302,193	410,195	0.3%
PLTU Sumatera	<u>62,530</u>	<u>62,329</u>	0.3%
	788,417	1,025,887	

Di tahun 2020, Perusahaan mendapat surat persetujuan dari PLN untuk menurunkan bunga pinjaman menjadi 0,3% per tahun. Atas transaksi ini, Perusahaan mencatat selisih nilai wajar pinjaman pemegang saham pada akun ekuitas sebagai tambahan modal disetor sebesar Rp462.171.

Pada tahun 2022, Perusahaan mencatat penyesuaian atas perubahan selisih nilai wajar pinjaman pemegang saham sebesar Rp93.294 karena pembayaran kembali lebih awal. Pada tanggal 31 Desember 2022, selisih nilai wajar pinjaman pemegang saham yang dicatat sebagai tambahan modal disetor adalah sebesar Rp368.877.

In 2020, the Company obtained an approval letter from PLN to reduce the loan interest rate to 0.3% per annum. For this transaction, the Company recorded the difference in fair value of shareholder loan as equity account under additional paid-in capital amounted to Rp462,171.

In 2022, the Company recorded adjustment due to changes in the difference in fair value of shareholder loan amounted to Rp93,294 due to early repayment. As at 31 Desember 2022, the difference in fair value of shareholder loan recorded under additional paid-in capital is Rp368,877.

14. PERPAJAKAN

14. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka

a. Prepaid taxes

	2022	2021	
Pajak penghasilan Perusahaan			<i>Corporate income tax The Company</i>
2022	34,813	-	2022
2021	<u>85,001</u>	<u>85,001</u>	2021
	119,814	85,001	
Entitas anak			<i>Subsidiaries</i>
2022	6,977	-	2022
2021	6,321	4,902	2021
2020	<u>4,511</u>	<u>13,034</u>	2020
	17,809	17,936	
	137,623	102,937	

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/44 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

a. Prepaid taxes (continued)

	2022	2021	
Pajak lain-lain			Other taxes
Perusahaan			The Company
Pajak pertambahan nilai	265,490	748,008	Value added tax
Entitas anak			Subsidiaries
Pajak pertambahan nilai	110,515	2,096	Value added tax
	376,005	750,104	
Dikurangi: bagian jangka pendek	(265,490)	(666,967)	Less: current portion
	110,515	83,137	

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	2022	2021	
Pajak penghasilan:			Corporate income tax:
Perusahaan			The Company
- Pasal 25	-	268	Article 25 -
Entitas anak			Subsidiaries
- Pasal 29	19,643	12,670	Article 29 -
- Pasal 25	76	-	Article 25 -
	19,719	12,670	
	19,719	12,938	
Pajak lain-lain:			Other taxes:
Perusahaan			The Company
- Pajak pertambahan nilai	64,957	-	Value added tax -
- Pasal 22	7,649	14,422	Article 22 -
- Pasal 23	5,156	117	Article 23 -
- Pasal 4(2)	2,475	1,169	Article 4(2) -
- Pasal 21	1,582	1,131	Article 21 -
	81,819	16,839	
Entitas anak			Subsidiaries
- Pasal 23	19,123	14,448	Article 23 -
- Pajak pertambahan nilai	5,285	-	Value added tax -
- Pasal 4(2)	1,859	604	Article 4(2) -
- Pasal 22	1,706	28	Article 22 -
- Pasal 21	576	762	Article 21 -
	28,549	15,842	
	110,368	32,681	

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/45 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

	2022	2021	
Pajak penghasilan:			Corporate income tax:
- Kini	178,155	203,071	Current -
- Tangguhan	<u>505</u>	<u>(14,029)</u>	Deferred -
	<u><u>178,660</u></u>	<u><u>189,042</u></u>	

Perhitungan beban pajak penghasilan kini adalah sebagai berikut:

The calculation of the current corporate income tax expense is as follows:

	2022	2021	
Laba konsolidasian sebelum pajak	703,414	638,336	<i>Consolidated profit before tax</i>
Ditambah/(dikurangi):			<i>Add/(deduct):</i>
Disesuaikan dengan jurnal eliminasi konsolidasian	68,999	(91,528)	<i>Adjusted with consolidated elimination entries</i>
Laba sebelum pajak entitas anak	<u>(125,663)</u>	<u>(10,019)</u>	<i>The subsidiaries' profit before tax</i>
Laba sebelum pajak Perusahaan	<u>646,750</u>	<u>536,789</u>	<i>The Company's profit before tax</i>
Koreksi fiskal:			<i>Fiscal corrections:</i>
Liabilitas imbalan pascakerja	3,116	1,666	<i>Post-employment benefit liabilities</i>
Sewa	(662)	73	<i>Leases</i>
Pendapatan keuangan yang dikenakan pajak final	(120,479)	(100,605)	<i>Finance income subject to final tax</i>
Bagian (laba)/rugi bersih entitas anak	(64,535)	128,237	<i>Share of (profit)/loss in subsidiaries</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	<u>92,843</u>	<u>209,081</u>	<i>Non-deductible expenses</i>
Laba fiskal - Perusahaan	<u>557,033</u>	<u>775,241</u>	<i>Taxable income - the Company</i>
Beban pajak penghasilan badan dengan tarif yang berlaku - Perusahaan	122,547	170,553	<i>Current corporate income tax expense with applicable tax rate - the Company</i>
Beban pajak penghasilan badan dengan tarif yang berlaku - entitas anak	<u>55,608</u>	<u>32,518</u>	<i>Current corporate income tax expense with applicable tax rate - subsidiaries</i>
Beban pajak penghasilan badan kini - konsolidasian	<u><u>178,155</u></u>	<u><u>203,071</u></u>	<i>Current corporate income tax expense - consolidation</i>

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/46 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

	2022	2021	
Beban pajak penghasilan badan dengan tarif yang berlaku - Perusahaan	122,547	170,553	<i>Current corporate income tax expense with applicable tax rate - the Company</i>
Pajak dibayar di muka - Perusahaan			<i>Prepaid taxes - the Company</i>
Pasal 22	(142,646)	(240,198)	<i>Article 22</i>
Pasal 23	(13,377)	(12,948)	<i>Article 23</i>
Pasal 25	<u>(1,337)</u>	<u>(2,408)</u>	<i>Article 25</i>
Lebih bayar pajak penghasilan badan - Perusahaan	<u>(34,813)</u>	<u>(85,001)</u>	<i>Overpayment of corporate income tax - the Company</i>
Perhitungan pajak penghasilan kini dilakukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan saat SPT tahunan disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak ("DJP").			<i>Current income tax computations are based on estimated taxable income. The amounts may be adjusted when annual tax returns are filed with the Directorate General of Tax ("DGT").</i>
Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perhitungan pajak teoritis atas laba sebelum pajak konsolidasian Grup adalah sebagai berikut:			<i>The reconciliation between tax expense and the theoretical tax amount on the Group's consolidated profit before tax is as follows:</i>

	2022	2021	
Laba sebelum pajak konsolidasian	<u>703,414</u>	<u>638,336</u>	<i>Consolidated profit before tax</i>
Pajak yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	154,751	140,434	<i>Income tax calculated at applicable tax rate</i>
Penghasilan keuangan yang dikenakan pajak final	(5,142)	(3,490)	<i>Finance income subjected to final tax</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	15,190	39,110	<i>Non-deductible expenses</i>
Aset pajak tangguhan atas rugi fiskal yang tidak diakui entitas anak	<u>13,861</u>	<u>12,988</u>	<i>Unrecognised deferred tax assets from tax loss carryforward - subsidiaries</i>
	<u>178,660</u>	<u>189,042</u>	

d. Aset pajak tangguhan

d. Deferred tax assets

	31 Desember/December 2022				
	Saldo awal/ Beginning balances	(Dibebankan) ke laba rugi/ (Charged) to profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balances	
Penyusutan	801	(1,132)	-	(331)	Depreciation
Penurunan nilai atas uang muka	35,328	-	-	35,328	Impairment of advances
Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	2,592	-	-	2,592	Provision for environmental and mine closure
Penyisihan kerugian piutang lain-lain	680	-	-	680	Loss allowances for other receivables
Sewa	57	(58)	-	(1)	Leases
Liabilitas imbalan pascakerja	<u>1,356</u>	<u>685</u>	<u>220</u>	<u>2,261</u>	Post-employment benefit liabilities
	<u>40,814</u>	<u>(505)</u>	<u>220</u>	<u>40,529</u>	

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/47 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

	31 Desember/December 2021			
	Saldo awal/ <i>Beginning balances</i>	Dikreditkan ke laba rugi/ <i>Credited to profit or loss</i>	(Charged) to other komprehensif lain/ <i>comprehensive income</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balances</i>
Penyusutan	616	185	-	801
Penurunan nilai atas uang muka	23,351	11,977	-	35,328
Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	1,807	785	-	2,592
Penyisihan kerugian piutang lain-lain	-	680	-	680
Sewa	21	36	-	57
Liabilitas imbalan pascakerja	1,268	366	(278)	1,356
	<u>27.063</u>	<u>14.029</u>	<u>(278)</u>	<u>40.814</u>

e. Audit pajak

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan, BBN dan BKL sedang dalam proses audit oleh DJP atas Pajak Penghasilan Badan ("PPh Badan") dan pajak lainnya untuk tahun pajak 2020 sampai 2021. Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, hasil audit tersebut belum diterima. Manajemen berpendapat bahwa hasil audit tersebut tidak akan memberikan dampak yang akan merugikan posisi keuangan dan arus kas Grup secara material.

Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2022, Grup telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp4.739 (2021: Rp136.877) atas PPh Badan dan pajak lainnya untuk tahun pajak 2020 (2021: PPh Badan untuk tahun pajak 2019).

f. Tarif pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang- Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah disahkan. UU HPP menetapkan tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap dari tahun pajak 2022 tetap sebesar 22%.

g. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan dan entitas anak yang berada di dalam Grup menghitung dan menyertorkan besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

14. TAXATION (continued)

d. Deferred tax assets (continued)

	31 Desember/December 2021			
	(Dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ <i>(Charged) to other comprehensive income</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balances</i>		
Depreciation				
Impairment of advances				
Provision for environmental and mine closure				
Loss allowances for other receivables				
Leases				
Post-employment benefit liabilities				

e. Tax audit

As at the date of these consolidated financial statements, the Company, BBN and BKL are being audited by the DGT regarding Corporate Income Tax ("CIT") and other taxes for the fiscal year 2020 to 2021. As at the date of these consolidated financial statements, the audit results have not yet been received. Management is of the opinion that the audit results will not have a material adverse impact on the Group's financial position and cash flows.

During the year ended 31 December 2022, the Group has received tax refunds amounting to Rp4,739 (2021: Rp136,877) for CIT and other taxes for fiscal year 2020 (2021: CIT for fiscal year 2019).

f. Tax rate

On 29 October 2021, Law No. 7 Year 2021 on Harmonisation of Tax Regulations (the "HPP Law") was issued. The HPP Law stipulates that the corporate income tax rate for Corporate Tax Payers and Permanent Establishments from fiscal year 2022 remains at 22%.

g. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Company and the companies within the Group submit tax returns on the basis of self assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/48 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Nama pemegang saham/ Name of shareholders	Jumlah saham/Number of share*)	Percentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-up share capital
PLN	24,999	99.99%	24,999
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan ("YPK") PLN	1	0.01%	1
	25,000	100.00%	25,000

*) Dalam jumlah penuh/*In full amount*

Berdasarkan Akta Notaris No. 72 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang juga memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000004.AH.01.02.TAHUN 2023. Atas dampak pembentukan struktur subholding (Catatan 1b) maka komposisi modal saham Perusahaan yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

Based on Notary Deed No. 72 dated 30 December 2022 concerning Amendments to the Articles of Association of the Company which obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0000004.AH.01.02.TAHUN 2023. The impact of establishment of subholding structures (Note 1b) on the composition of the Company's share capital effective on 1 January 2023 is as follows:

Nama pemegang saham/ Name of shareholders	Jumlah saham/Number of share*)	Percentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-up share capital
PLN	2,298,716	100%	2,298,716
YPK PLN	1	0%	1
	2,298,717	100%	2,298,717

*) Dalam jumlah penuh/*In full amount*

Cadangan wajib

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, mengharuskan Perusahaan untuk membentuk cadangan wajib sampai cadangan menjadi paling sedikit 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu tertentu yang ditetapkan untuk pembentukan cadangan wajib tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan belum membentuk cadangan wajib tersebut.

Statutory reserve

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 introduced in August 2007, requires the Company to establish a statutory reserve from net profits amounting to at least 20% of issued and paid-up capital. There is no set period of time over which this reserve should be established. On 31 December 2022 and 2021, the Company has not yet established the statutory reserve.

16. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

16. NON-CONTROLLING INTERESTS

	2022	2021	
JPC	398,843	398,605	JPC
BKL	333,654	316,961	BKL
BBI	75,732	75,872	BBI
	808,229	791,438	

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/49 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. PENJUALAN

17. SALES

	2022	2021	
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PLN	7,482,903	11,632,080	PLN
SGPJB	1,214,362	664,010	SGPJB
PIP	248,046	428,665	PIP
PLN Batam	145,970	155,334	PLN Batam
PNP	<u>129,953</u>	<u>583,147</u>	PNP
	<u>9,221,234</u>	<u>13,463,236</u>	
Pihak ketiga	<u>1,398,913</u>	<u>382,293</u>	<i>Third parties</i>
	<u>10,620,147</u>	<u>13,845,529</u>	

Lihat Catatan 20 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 20 for details of related party transactions.

18. BEBAN POKOK PENJUALAN

18. COST OF SALES

	2022	2021	
Beban langsung:			<i>Direct costs:</i>
Transportasi	1,633,538	1,152,340	Transportation
Pengupasan tanah	332,287	213,197	Stripping cost
Royalti	35,383	31,494	Royalty
Lain-lain	<u>178,835</u>	<u>227,108</u>	Others
	<u>2,180,043</u>	<u>1,624,139</u>	
Persediaan awal tahun	122,564	117,948	<i>Beginning inventories</i>
Pembelian	7,809,172	11,318,096	<i>Purchases</i>
Persediaan akhir tahun	<u>(331,978)</u>	<u>(122,564)</u>	<i>Ending inventories</i>
	<u>9,779,801</u>	<u>12,937,619</u>	

Lihat Catatan 20 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 20 for details of related party transactions.

19. PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN-LAIN, BERSIH

19. OTHER INCOME/(EXPENSES), NET

	2022	2021	
Bagian laba/(rugi) dari investasi di entitas asosiasi (Catatan 9)	28,867	10,373	<i>Share of profit/(loss) from investment in associates (Note 9)</i>
Pendapatan lain-lain	28,390	24,141	<i>Other income</i>
Amortisasi kenaikan nilai wajar (Catatan 9)	(16,474)	(16,474)	<i>Amortisation of fair value uplift (Note 9)</i>
Beban pajak	(14,499)	(58,309)	<i>Tax expense</i>
Penurunan nilai atas uang muka	-	(54,440)	<i>Impairment for advances</i>
Penurunan nilai atas aset eksplorasi dan evaluasi	<u>-</u>	<u>(16,051)</u>	<i>Impairment of exploration and evaluation assets</i>
	<u>26,284</u>	<u>(110,760)</u>	

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/50 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI **20. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**

Sifat hubungan berelasi

- a. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PLN dan BUMN lainnya.
- b. PLN dan YPK PLN merupakan pemegang saham Grup.
- c. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.

Transaksi pihak berelasi

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup:

Nature of related parties

- a. The Government of the Republic of Indonesia is the shareholder of PLN and other SOEs.
- b. PLN and YPK PLN are the shareholders of the Group.
- c. The Board of Commissioner and Directors are the key management of the Company and its subsidiaries.

Transactions with related parties

Below is the list of related parties with which the Group has transactions:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Sifat transaksi/ Nature of transactions
PLN	Entitas induk Perusahaan/ <i>Parent entity of the Company</i>	Piutang usaha, piutang non-usaha, utang lain-lain, penjualan, penghasilan/(beban) lain-lain, bersih dan pinjaman pemegang saham/ <i>Trade receivables, non-trade receivables, other payables, sales, other income/(expenses), net and shareholder loan</i>
PLN Batam	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Piutang usaha dan penjualan/ <i>Trade receivables and sales</i>
SGPJB	Ventura bersama PNP, entitas sepengendali dengan Perusahaan/ <i>Joint venture of PNP, entity under common control</i>	Piutang usaha dan penjualan/ <i>Trade receivables and sales</i>
ICON+	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Biaya masih harus dibayar dan beban umum dan administrasi/ <i>Accrued expenses and general and administrative expenses</i>
BAG	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Biaya masih harus dibayar dan beban pokok penjualan/ <i>Accrued expenses and cost of sales</i>
PT Haleyora Powerindo ("HPI")	Entitas anak PT Haleyora Power ("HP"), entitas sepengendali dengan Perusahaan/ <i>Subsidiary of HP, entity under common control</i>	Biaya masih harus dibayar dan beban umum dan administrasi/ <i>Accrued expenses and general and administrative expenses</i>
PNP	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Piutang usaha, piutang non-usaha, penjualan, dan penghasilan/(beban) lain-lain, bersih/ <i>Trade receivables, non-trade receivables, sales and other income/(expenses), net</i>

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/51 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi pihak berelasi (lanjutan)

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup: (lanjutan)

20. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Transactions with related parties (continued)

Below is the list of related parties with which the Group has transactions: (continued)

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Sifat transaksi/ Nature of transactions
PIP	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Piutang usaha, piutang non-usaha, penjualan, dan penghasilan/(beban) lain-lain, bersih/ <i>Trade receivables, non-trade receivables, sales and other income/(expenses), net</i>
SBL	Entitas asosiasi/ <i>Associate</i>	Aset lancar lainnya, utang usaha, utang lain-lain dan beban pokok penjualan/ <i>Other current assets, trade payables, other payables and cost of sales</i>
MMJ	Entitas asosiasi/ <i>Associate</i>	Aset lancar lainnya, utang usaha dan beban pokok penjualan/ <i>Other current assets, trade payables and cost of sales</i>
PT Surveyor Indonesia ("SI")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government - related entity</i>	Biaya masih harus dibayar dan beban pokok penjualan/ <i>Accrued expenses and general and administrative expenses</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government - related entity</i>	Penempatan kas dan setara kas dan penempatan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya/ <i>Placement of cash and cash equivalents and placement of restricted cash and equivalents</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government - related entity</i>	Penempatan kas dan setara kas dan penempatan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya/ <i>Placement of cash and cash equivalents and placement of restricted cash and equivalents</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government - related entity</i>	Penempatan kas dan setara kas dan penempatan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya/ <i>Placement of cash and cash equivalents and placement of restricted cash and equivalents</i>

Saldo dan transaksi pihak berelasi

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi yang tidak diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah sebagai berikut:

Balances and transactions with related parties

Related party balances and transactions not disclosed elsewhere in these consolidated financial statements are as follows:

	2022	2021	Other current assets
Aset lancar lainnya			SB_L
SBL	9,081	7,172	
MMJ	5,316	5,282	
	14,397	12,454	MMJ

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/52 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dan transaksi pihak berelasi (lanjutan)

Biaya yang masih harus dibayar

	2022	2021	
BAG	141,730	320,961	
HPI	4,262	1,686	
SI	1,348	627	
ICON+	318	134	
	147,658	323,408	

Beban pokok penjualan

	2022	2021	
BAG	643,009	737,403	
MMJ	41,021	27,166	
SBL	39,765	25,417	
SI	2,042	5,243	
	725,837	795,229	

Biaya umum dan administrasi

	2022	2021	
HPI	13,684	11,513	
ICON+	1,465	1,620	
	15,149	13,133	

Kebijakan harga Perusahaan dan entitas anak yang berhubungan dengan transaksi dengan pihak berelasi ditetapkan berdasarkan pada harga di dalam kontrak.

The Company and subsidiaries pricing policy related to transactions with related parties is set based on contracted prices.

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp17.194 dan Rp11.526.

Total compensation of the Company's Boards of Commissioners and Directors in 2022 and 2021 were Rp17,194 and Rp11,526, respectively.

Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

All of the remunerations to the Company's Board of Commissioners and Directors represent short-term employee benefits.

21. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI

a. Perjanjian jasa pertambangan

Beberapa entitas anak mengadakan perjanjian jasa pertambangan dengan beberapa kontraktor untuk mendukung kegiatan operasi pertambangan. Para kontraktor akan menyediakan peralatan, tenaga kerja dan perlengkapan lainnya untuk mendukung jasa mereka. Setiap perjanjian mengatur antara lain mengenai harga per unit, penyesuaian harga bahan bakar, perhitungan *rise and fall*, perhitungan *overhaul*, insentif untuk kontraktor, penalti atas *shortfall*, pengangkutan batubara dan syarat lainnya. Nilai kontrak tergantung dari jumlah volume pengupasan tanah ataupun batubara yang diangkut sesuai dengan perjanjian terkait.

21. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Mining purchase contracts

The Company's subsidiaries entered into various mining service contracts to support their mining operations. The contractors will provide all equipment, manpower and other supplies necessary for them to perform the mining services. Each agreement governs, among others, the unit rate, fuel price adjustment, rise and fall calculation, overhaul calculation, incentives for the contractors, shortfall penalties, coal hauling and other terms. Contract values are dependent on volumes of overburden moved and/or hauled and equipment rented, as per the relevant agreement.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/53 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian jasa pertambangan (lanjutan)

Kontrak signifikan yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Entitas anak/ Subsidiaries	Kontraktor/ Contractors	Tipe perjanjian/ Agreement type	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Akhir periode perjanjian/Contract period end
JPC	PT Benal Aiti Bara Perkasa	Jasa pengupasan lapisan tanah dan jasa penambangan/ <i>Stripping of overburden and mining of coal</i>	1 Agustus/ August 2022	31 Juli/ July 2025
JPC*)	PT Aribayo Bara Pratama	Jasa pengupasan lapisan tanah dan jasa penambangan/ <i>Stripping of overburden and mining of coal</i>	1 Agustus/ August 2022	31 Juli/ July 2025
BKL	PT Ulima Nitra	Jasa pengupasan lapisan tanah dan jasa penambangan/ <i>Stripping of overburden and mining of coal</i>	7 Oktober/ 7 October 2020	26 Mei/ 26 May 2025
BKL	PT Cahaya Riau Mandiri	Jasa pengupasan lapisan tanah dan jasa penambangan/ <i>Stripping of overburden and mining of coal</i>	18 April/ 18 April 2022	17 April/ 17 April 2025

*) Di bulan Maret 2023, JPC dan kontraktor mengakhiri lebih awal kontrak jasa pertambangan/
In March 2023, JPC and the contractor early terminated the mining services contract.

b. Perjanjian penjualan batubara

BBN, JPC dan BKL

Pada tanggal 31 Desember 2022, BBN, JPC dan BKL memiliki komitmen untuk menjual 5,1 juta metrik ton batubara kepada beberapa pembeli. Penjualan batubara ini akan dilakukan selama periode mulai Januari 2023 sampai dengan Juni 2025.

c. Perjanjian pembelian batubara

BBN

Pada tanggal 31 Desember 2022, BBN memiliki komitmen untuk membeli 1,7 juta metrik ton batubara dari beberapa pemasok. Pembelian batubara ini akan dilakukan selama periode mulai Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

d. Perjanjian jasa pelayanan

Sebagai tindak lanjut pembentukan Perusahaan sebagai subholding di bidang penyediaan dan logistik energi primer, PLN, PIP dan PNP menunjuk Perusahaan untuk menyediakan jasa manajemen pengadaan dan penyediaan energi primer beserta infrastrukturnya efektif sejak tanggal 1 Januari 2023. Jasa tersebut meliputi perencanaan, pengadaan, penyediaan, pengiriman dan logistik penyediaan energi primer sesuai dengan instruksi dari PLN, PIP dan PNP.

21. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Mining purchase contracts (continued)

Significant contracts in place at 31 December 2022 are as follows:

Entitas anak/ Subsidiaries	Kontraktor/ Contractors	Tipe perjanjian/ Agreement type	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Akhir periode perjanjian/Contract period end
JPC	PT Benal Aiti Bara Perkasa	Jasa pengupasan lapisan tanah dan jasa penambangan/ <i>Stripping of overburden and mining of coal</i>	1 Agustus/ August 2022	31 Juli/ July 2025
JPC*)	PT Aribayo Bara Pratama	Jasa pengupasan lapisan tanah dan jasa penambangan/ <i>Stripping of overburden and mining of coal</i>	1 Agustus/ August 2022	31 Juli/ July 2025
BKL	PT Ulima Nitra	Jasa pengupasan lapisan tanah dan jasa penambangan/ <i>Stripping of overburden and mining of coal</i>	7 Oktober/ 7 October 2020	26 Mei/ 26 May 2025
BKL	PT Cahaya Riau Mandiri	Jasa pengupasan lapisan tanah dan jasa penambangan/ <i>Stripping of overburden and mining of coal</i>	18 April/ 18 April 2022	17 April/ 17 April 2025

b. Coal sales agreements

BBN, JPC and BKL

As of 31 December 2022, BBN, JPC and BKL have commitments to sell 5.1 million metric tonnes of coal to various buyers. These coal sales will be delivered during the period from January 2023 to June 2025.

c. Coal purchase agreements

BBN

As of 31 December 2022, BBN has commitments to purchase 1.7 million metric tonnes of coal from various suppliers. This coal purchase will be carried out during the period from January 2023 to December 2023.

d. Service provider agreement

As a follow-up to the establishment of the Company as a subholding in the primary energy procurement and logistics sector, PLN, PIP and PNP appointed the Company to provide management services for procurement and supply of primary energy and its infrastructure effective from 1 January 2023. These services include planning, procurement, supply, delivery and logistics of primary energy supply in accordance with instructions from PLN, PIP and PNP.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/54 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI (lanjutan)

d. Perjanjian jasa pelayanan (lanjutan)

Pada tanggal 30 Desember 2022, Perusahaan mengadakan Kontrak Jasa Manajemen Penyediaan Energi Primer dengan PLN untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan pengadaan dan penyediaan batubara, biomassa, gas dan bahan bakar minyak, termasuk logistiknya dan Perjanjian Penyediaan Layanan Energi Primer dengan PIP dan PNP untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan pengadaan dan penyediaan batubara dan biomassa termasuk logistiknya selama 10 tahun terhitung sejak 1 Januari 2023. Kompensasi yang diterima atas pemberian jasa manajemen akan diatur secara terpisah.

e. Undang-Undang Pertambangan No. 3/2020

Pada tanggal 16 Desember 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia meloloskan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru ("Undang-Undang"), yang telah disetujui oleh Presiden pada 12 Januari 2009, menjadi UU No. 4/2009.

Pada tanggal 12 Mei 2020, Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") mengesahkan Perubahan atas UU Minerba, dimana pada tanggal 10 Juni 2020 ditandatangi oleh Presiden RI sebagai Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4/2009.

UU No. 3/2020 tersebut antara lain mengatur:

- (i) Penyelenggaraan penguasaan aktivitas mineral dan batubara dilakukan oleh Pemerintah Pusat dimana sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (ii) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengusaha Pertambangan Batubara ("PKP2B") diberikan jaminan perpanjangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK") sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:
 - a. PKP2B yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan dua kali perpanjangan dalam bentuk IUPK masing-masing untuk jangka waktu paling lama sepuluh tahun.
 - b. PKP2B yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK untuk jangka waktu paling lama sepuluh tahun.

21. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

d. Service provider agreement (continued)

On 30 December 2022, the Company entered into Primary Energy Supply Management Service Contracts with PLN to arrange the implementation of coal, biomass, gas and fuel procurement and supply management, including the logistics and Primary Energy Service Provision Agreements with PIP and PNP to arrange the implementation of coal and biomass procurement and supply management, including the logistics for ten years commencing from 1 January 2023. The compensation received for providing the management services will be arranged separately.

e. Mining Law No. 3/2020

On 16 December 2008, the Indonesian Parliament passed a new Law on Mineral and Coal Mining (the "Law"), which received the assent of the President on 12 January 2009, becoming Law No. 4/2009.

On 12 May 2020, the People's Representative Council ("DPR") passed the Amendment to Minerba Law, which on 10 June 2020 was signed by the President of the Republic of Indonesia as Law No. 3 of 2020 on Amendments to Law No. 4/2009.

Law No. 3/2020 sets forth, among others:

- (i) *The control of mineral and coal activities is carried out by the Central Government, where previously it was carried out by the Central Government and/or the Regional Government.*
- (ii) *For the extension of a Coal Contract of Work ("CCoW"), a guarantee for extension to an Special Mining Business License ("IUPK") is provided as a continuation of an Operations Contract/Agreement after meeting the following criteria:*
 - a. *CCoWs that have not obtained any extension are guaranteed to receive two extensions as an IUPK, each for a maximum period of ten years.*
 - b. *CCoWs that have not obtained any extension are guaranteed to receive two extensions as an IUPK, each for a maximum period of ten years.*

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/55 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI (lanjutan)

e. Undang-Undang Pertambangan No. 3/2020 (lanjutan)

- (iii) Kegiatan eksplorasi wajib dilanjutkan oleh pemegang IUPK termasuk menyediakan anggaran eksplorasi dan juga Dana Ketahanan Cadangan Mineral dan Batubara untuk kegiatan eksplorasi cadangan baru.
- (iv) Adanya komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan ("WIUP").
- (v) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan 100% kegiatan reklamasi dan pasca tambang sebelum menciumtakan atau mengembalikan area konsesinya.

Manajemen menilai bahwa saat ini tidak ada dampak signifikan terhadap Grup dari poin-poin utama undang-undang baru sebagaimana disebutkan di atas.

f. Peraturan Pemerintah No. 96/2021

Pada tanggal 9 September 2021, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 96/2021 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan untuk mengatur lebih lanjut berbagai ketentuan yang ditetapkan dalam UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3/2020 tentang Perubahan atas UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. PP ini mencabut dan menggantikan PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang sebelumnya telah beberapa kali diubah, terakhir dengan diterbitkannya PP No. 8/2018.

Manajemen menilai bahwa saat ini tidak ada dampak signifikan terhadap Grup dari peraturan baru tersebut.

g. Peraturan Domestic Market Obligation ("DMO")

Pada tanggal 4 Agustus 2021, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("MESDM") mengeluarkan Keputusan Menteri No.139.K /HK.02/ MEM.B/2021 yang mencabut peraturan sebelumnya Keputusan Menteri MESDM No. 66.K/HK.02/MEM.B/2021 mengenai Perubahan atas Keputusan Menteri No.255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021 dimana Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP/IUPK) Operasi Produksi dan PKP2B) wajib memenuhi persentase penjualan batubara untuk DMO sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batubara tahunan yang disetujui oleh Pemerintah.

21. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

e. Mining Law No. 3/2020 (continued)

- (iii) Exploration activities must be continued by such IUPK holders, including the provision of exploration budget and Mineral and Coal Reserves Sustainability Fund for exploration of new reserves.
- (iv) A commitment from the central government and local governments (Pemda) to not change the allocation of space and areas for Mining Business Permit Areas ("WIUP").
- (v) Holders of Operation Production IUPs or Operation Production IUPKs are required to carry out 100% of the reclamation and post mining activities before relinquishment or return of the concession area.

Management considers that there is no significant impact on the Group from the main points of the new law as mentioned above.

f. Government Regulation No. 96/2021

On 9 September 2021, the Government issued Government Regulation ("GR") No. 96/2021 concerning the Implementation of Mining Business Activities to further regulate various provisions stipulated in Law No. 4/2009 concerning Mineral and Coal Mining, which has been amended by Law No. 3/2020 concerning Amendments to Law No. 4/2009 concerning Mineral and Coal Mining. This GR revokes and replaces GR No. 2/2010 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities, which had previously been amended several times, most recently with the issuance of GR No. 8/2018.

Management considers that there is no significant impact on the Group from the new regulation.

g. Domestic Market Obligation ("DMO") regulation

On 4 August 2021, the Ministry of Energy and Mineral Resources ("MoEMR") issued Ministerial Decree No. 139.K/HK.02/ MEM.B/2021 which revoked the previous MoEMR Decree No. 66.K/HK.02/MEM.B/2021 concerning Amendment to Ministerial Decree No. 255.K/30/MEM/2020 regarding Fulfilment of Domestic Coal Needs in 2021 under which Mining Business Permit Holders (IUP/IUPK Production Operation and CCoW) are required to fulfill the percentage of coal sales for DMO of 25% of the planned annual coal production amount approved by the Government.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/56 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI (lanjutan)

g. Peraturan Domestic Market Obligation ("DMO") (lanjutan)

Pada tanggal 19 Januari 2022, MESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 13.K/HK.021/MEM.B/2022 tentang pedoman pengenaan sanksi administratif, pelarangan penjualan batubara ke luar negeri, dan pengenaan denda serta kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri.

Pada tanggal 21 November 2022, MESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri.

Manajemen menilai bahwa tidak ada dampak signifikan terhadap Grup dari peraturan baru tersebut.

h. Peraturan iuran eksplorasi

Pada tanggal 11 April 2022, Pemerintah Indonesia menerbitkan PP No. 15/2022 yang mengatur perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP") dalam sektor pertambangan batubara. Pengaturan ini berlaku untuk pemegang IUP, IUPK, IUPK eks PKP2B dan PKP2B:

Ketentuan PNBP bagi Pemegang IUPK eks PKP2B diantaranya mengatur sebagai berikut:

- (i) Kewajiban PNBP Produksi dengan tarif berjenjang untuk penjualan ekspor dan domestik, tergantung dari jenis PKP2B:
 - a. IUPK dari PKP2B Generasi 1 dengan tarif berjenjang sebesar 14%-28% sesuai lapisan Harga Batubara Acuan ("HBA").
 - b. IUPK dari PKP2B Generasi 1+ dengan tarif berjenjang 20%-27% sesuai lapisan HBA.
- (ii) Kewajiban PNBP Produksi di atas termasuk:
 - a. Tarif Iuran Tetap dan Iuran Produksi/Royalti sesuai ketentuan berlaku.
 - b. Tarif 0,21% dikalikan Harga Jual atas Pemanfaatan Barang Milik Negara eks PKP2B.
- (iii) Tarif penerimaan negara bukan pajak dan retribusi daerah sebesar 4% dan 6% dari pendapatan bersih setelah pajak untuk IUPK.

21. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

g. Domestic Market Obligation ("DMO") regulation (continued)

On 19 January 2022, the MoEMR issued Ministerial Decree No. 13.K/HK.021/MEM.B/2022 regarding guidelines for administrative sanctions, prohibition of selling coal abroad, and imposition of fines and compensation for fulfilling domestic coal needs.

On 21 November 2022, the MoEMR issued Ministerial Decree No. 267.K/MB.01/MEM.B/2022 regarding Fulfilment of Domestic Coal Needs.

Management considers that there is no significant impact on the Group from the new regulation.

h. Exploitation fee regulation

On 11 April 2022, the Government of Indonesia issued GR No. 15/2022 which regulates the treatment of tax and/or non-tax state revenue ("PNBP") in the coal mining sector. This regulation applies to holders of an IUP, IUPK, IUPK ex CCoW and CCoW:

Provisions on PNBP for IUPK ex CCoW holders, among others, regulate the following:

- (i) Production PNBP obligations with tiered tariffs for export and domestic sales, depending on the type of CCoW:
 - a. IUPK from CCoW Generation 1 with tiered tariffs of 14%-28% according to the Benchmark Coal Price ("HBA") layer.
 - b. IUPK from CCoW Generation 1+ with a tiered tariff of 20%-27% according to the HBA layer.
- (ii) The above Production PNBP obligations include:
 - a. Dead Rent and Production Contribution/Royalty Tariff in accordance with applicable regulations.
 - b. The tariff is 0.21% multiplied by selling price for the Utilisation of State Property ex CCoW.
- (iii) Non-tax state revenue and regional retribution tariff of 4% and 6% from the net income after tax for IUPK.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/57 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI (lanjutan)

h. Peraturan iuran eksplorasi (lanjutan)

Ketentuan perpajakan akan berlaku mulai tahun 2023 dan Grup masih menunggu peraturan pelaksanaannya.

Pada tanggal 15 Agustus 2022, Pemerintah mengeluarkan PP No. 26/2022 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM, termasuk penyesuaian pada tarif iuran eksplorasi/royalti batubara. Besaran tarif iuran eksplorasi/royalti batubara berjenjang 5%-13,5% sesuai tingkat kalori dan lapisan HBA. Peraturan ini berlaku sejak 14 September 2022. PP ini mencabut PP No. 81/2019

Manajemen berkeyakinan bahwa Grup telah memenuhi ketentuan dalam peraturan sebagaimana disebut di atas.

i. Peraturan reklamasi dan aktivitas pasca tambang

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas Undang-Undang Mineral No. 4/2009, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78/2010 ("PP No. 78") yang diikuti oleh Peraturan Menteri ESDM No. 7/2014 tertanggal 28 Februari 2014 ("Permen No. 7/2014"), yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi. Permen No. 7/2014 ini telah dicabut oleh Peraturan MESDM No. 26/2018 pada tanggal 3 Mei 2018.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan liabilitas pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pasca tambang.

Grup memiliki liabilitas tertentu untuk restorasi dan rehabilitasi daerah pertambangan sesudah produksi selesai. Grup menghitung besarnya liabilitas tersebut yang mencukupi untuk memenuhi liabilitas yang timbul ketika produksi sudah selesai. Perubahan taksiran biaya restorasi dan lingkungan hidup yang akan terjadi dihitung secara prospektif berdasarkan sisa umur tambang.

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, JPC dan BKL telah membuat jaminan reklamasi untuk periode tertentu.

21. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

h. Exploitation fee regulation (continued)

The tax provisions will be effective from 2023 and the Group is still waiting for implementing regulations.

On 15 August 2022, the Government issued GR No. 26/2022 concerning types and tariffs of PNBP applicable to the MoEMR, including adjustments on coal exploitation fee/royalty tariffs. The amount of coal exploitation fee/royalty tariffs is ranging of 5%-13.5% according to the calorific value and HBA layer. This regulation is effective from 14 September 2022. This regulation revokes GR No. 81/2019.

Management believes that the Group has complied with the requirements of the regulations mentioned above.

i. Regulation on reclamation and post-mining activities

On 20 December 2010, the Government of Indonesia released an implementing regulation for Mining Law No. 4/2009, i.e. Government Regulation No. 78/2010 ("GR No. 78") which was followed on 28 February 2014, by Ministerial Regulation of ESDM No. 7/2014 ("MR No. 7/2014"), that deals with reclamation and post-mining activities for both IUP-Exploration and IUP-Production Operation holders. This MR No. 7/2014 has been revoked by the Ministerial Regulation of ESDM No. 26/2018 on 3 May 2018.

The requirement to provide reclamation and post-mine guarantee does not release the IUP holder from the requirement to perform reclamation and post-mine activities.

The Group has certain obligations to restore and rehabilitate mining areas following the completion of production. Such obligations are accrued, so that the accrual will be adequate to meet those obligations once the production process is fully completed. Changes in estimated restoration and environmental costs to be incurred are accounted for on a prospective basis over the remaining life of the mine.

As at the date of these consolidated financial statements, JPC and BKL have placed reclamation guarantees for certain periods.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/58 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI (lanjutan)

j. Undang-Undang No. 7/2021

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah telah mengesahkan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU No. 7/2021 memuat sejumlah perubahan aturan perpajakan antara lain membatalkan penurunan tarif PPh Badan sebelumnya dari 22% ke 20% di tahun pajak 2022, sehingga tarif PPh Badan tetap di 22% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, kenaikan tarif PPh Orang Pribadi tertinggi sebesar 35% dengan penghasilan kena pajak diatas Rp5 miliar berlaku mulai tahun pajak 2022, kenaikan bertahap tarif PPN menjadi 11% berlaku mulai 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025 dan program pengungkapan sukarela wajib pajak.

Undang-Undang ini juga memperkenalkan Pajak Karbon. Subjek Pajak Karbon yaitu orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pajak Karbon akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan/atau Peraturan Pemerintah.

Pada bulan Desember 2022, Pemerintah menerbitkan 4 PP yang menjadi peraturan turunan dari UU No. 7/2021 yaitu:

1. PP No. 44/2022 tentang Penerapan terhadap PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("PPnBM").
2. PP No. 49/2022 tentang PPN atau PPnBM Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean.
3. PP No. 50/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
4. PP No. 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

k. UU Cipta Kerja

Pada bulan November 2020, Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja mulai berlaku. Selama 2021, Pemerintah secara resmi mengesahkan beberapa peraturan pelaksana UU Cipta Kerja.

21. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

j. Law No. 7/2021

On 29 October 2021, the Government agreed on Law No. 7/2021 relating to Harmonisation of Tax Regulations. Law No. 7/2021 contains a number of changes to tax rules, including repealing the previous reduction in CIT rate from 22% to 20% in fiscal year 2022, so that the CIT rate remains at 22% for fiscal year 2022 onwards, an increase in the highest Personal Income Tax rate to 35% for taxable income above IDR5 billion from the 2022 fiscal year, a gradual increase in the VAT rate to 11% effective from 1 April 2022 and 12% no later than 1 January 2025 and a taxpayer voluntary disclosure programme.

The Law also introduces a Carbon Tax. The subject of the Carbon Tax is an individual or entity that buys goods containing carbon and/or carries out activities that produce carbon emissions. Further provisions regarding the Carbon Tax will be regulated in a Minister of Finance Regulation and/or Government Regulation.

In December 2022, the Government issued 4 GRs derived from Law No. 7/2021 which are:

1. GR No. 44/2022 regarding Implementation of VAT on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods ("PPnBM").
2. GR No. 49/2022 regarding VAT Exemption and Non-collectible VAT or PPnBM on Imported and/or Transfer of Certain Goods and/or Transfer of Certain Services and/or Utilisation of Certain Services from Outside Customs Area.
3. GR No. 50/2022 regarding Procedures for the Implementation of Rights and Fulfilment of Tax Obligations.
4. GR No. 55/2022 regarding the Adjustment of Regulations in the Field of Income Tax.

k. Job Creation Law

In November 2020, Law No. 11/2020 about Job Creation became effective. During 2021, the Government has officially authorised various implementing regulations.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/59 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI (lanjutan)

k. UU Cipta Kerja (lanjutan)

Selanjutnya, pada bulan November 2021, Mahkamah Konstitusi ("MK") menggelar sidang putusan hasil uji formil dan materiil UU Cipta Kerja dengan nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam amar putusan, MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat dan harus dilakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun dari putusan tersebut diputuskan.

Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah menerbitkan PP Pengganti Undang-Undang ("Perppu") No. 2/2022 tentang Cipta Kerja. Ketetapan ini untuk melaksanakan amanat revisi Undang-Undang Cipta Kerja serta untuk mengantisipasi berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik yang ditimbulkan oleh dinamika global saat ini. Penyesuaian dalam Perppu No. 2/2022 sebagian besar terkait dengan penggunaan istilah dan pengaturan ulang kalimat serta beberapa perubahan yang cukup substansial, seperti penghapusan pasal terkait kewajiban pengelolaan limbah B3 dari ketentuan pengenaan sanksi administratif, adanya perubahan definisi "persetujuan bangunan", serta terkait dengan ketenagakerjaan adanya perubahan substansial terkait ketentuan outsourcing dan upah minimum. Saat ini, Perppu ini tengah digugat oleh sejumlah elemen masyarakat ke MK.

Manajemen menilai bahwa saat ini tidak ada dampak signifikan terhadap Grup dari peraturan baru tersebut.

I. Keputusan Menteri ESDM No. 18.K/HK.02/MEM.B/2022

Pada tanggal 27 Januari 2022, MESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 18.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pembayaran/Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara serta Besaran/Formula Biaya Penyesuaian dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, di antaranya mengatur:

- (i) Mencabut sebagian ketentuan dalam Keputusan Menteri No. 1823.K/30/MEM/2018.
- (ii) Menetapkan kembali harga dasar untuk perhitungan royalti

21. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

k. Job Creation Law (continued)

Subsequently, in November 2021, the Constitutional Court held a hearing on the results of the formal and material test of the Job Creation Law number 91/PUU-XVIII/2020. In its ruling, the Constitutional Court stated that the Job Creation Law was conditionally unconstitutional and had to be amended within two years of the decision being made.

On 30 December 2022, the Government issued a Government Regulation in lieu of Law ("Perppu") No. 2/2022 regarding Job Creation. This decree is to carry out the mandate of the revision of the Job Creation Law and to anticipate various economic and geopolitical challenges posed by the current global dynamics. Adjustments in the Perppu No. 2/2022 are mostly related to the use of terms and rearrangement of sentences, as well as some quite substantial changes, such as the removal of articles related to the obligation to manage B3 waste from provisions for imposing administrative sanctions, changes to the definition of "building approval", and related to employment, there are substantial changes regarding outsourcing and minimum wage provisions. Currently, this Perppu is being challenged by a number of elements of society at the MK.

Management considers that there is no significant impact on the Group from the new regulation.

I. Ministerial Decree of MoEMR No. 18.K/HK.02/MEM.B/2022

On 27 January 2022, MoEMR issued Ministerial Decree No. 18.K/HK.02/MEM.B/2022 regarding the guidelines for the payment of Dead Rent, Production Fee/Royalty, and Coal Production Result Fund and Adjustment Fee Amount/Formula in Mineral and Coal Mining Business Activities, which regulated the following:

- (i) Revoking some provisions under Ministerial Decree No. 1823.K/30/MEM/2018.
- (ii) Re-stipulating the base price for royalty calculation.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/60 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI (lanjutan)

m. Peraturan Presiden No. 55/2022

Pada tanggal 11 April 2022, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 55/2022 yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi mengenai penerbitan IUP, Izin Usaha Jasa Pertambangan ("IUJP"). Pendeklegasian Perizinan tersebut juga disertai dengan pendeklegasian wewenang untuk pemberian dan penetapan WIUP dan penetapan harga patokan.

22. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset keuangan Grup terdiri dari kas dan setara kas, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, dan piutang non-usaha sebesar Rp2.430.373 (2021: Rp2.508.931). Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Grup hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2022, liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, biaya masih harus dibayar, pinjaman pemegang saham dan liabilitas sewa sebesar Rp2.564.998 (2021: Rp3.320.201). Grup hanya memiliki liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

I. Faktor risiko keuangan

Aktivitas Grup rentan terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Grup secara keseluruhan dipusatkan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Grup berusaha untuk memperkecil efek yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Grup.

21. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

m. Presidential Regulation No. 55/2022

On 11 April 2022, the Government of Indonesia issued Presidential Regulation No. 55/2022 which regulates the delegation of authority in mining management from the Central Government to the Provincial Government regarding the issuance of IUP, Mining Services Business Permit ("IUJP"). The delegation of Licensing is also accompanied by the delegation of authority to grant and determine the WIUP and determination of benchmark prices.

22. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

As at 31 December 2022, the Group's financial assets comprised cash and cash equivalents, restricted cash and cash equivalents, trade receivables and non-trade receivables amounted to Rp2,430,373 (2021: Rp2,508,931). As at 31 December 2022 and 2021, the Group only has financial assets categorised as financial assets held at amortised cost.

As at 31 December 2022, the Group's financial liabilities comprised trade payables, other payables, accrued expenses, shareholder loan and lease liabilities amounted to Rp2,564,998 (2021: Rp3,320,201). The Group only has financial liabilities categorised as financial liabilities held at amortised cost.

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

I. Financial risk factors

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Group's overall risk management programme focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimise potential adverse effects on the Group's financial performance.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/61 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

I. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Grup secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko mata uang asing, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas.

a. Risiko pasar

i. Risiko nilai tukar mata uang asing

Secara kas, mayoritas transaksi Grup dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga mengurangi dampak dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Oleh karena itu, Grup menilai bahwa risiko nilai tukar mata uang asing adalah minimal.

ii. Risiko suku bunga

Eksposur terhadap suku bunga dimonitor untuk meminimalkan dampak negatif terhadap Grup. Pinjaman pemegang saham Grup menggunakan suku bunga tetap, sehingga tidak terdapat risiko pengaruh suku bunga mengambang dari pinjaman pemegang saham.

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup yang dipengaruhi oleh suku bunga mengambang adalah kas dan setara kas di bank dan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya di bank. Risiko pengaruh suku bunga mengambang pada kas dan setara kas dan kas di bank dan setara kas yang dibatasi penggunaannya di bank tidak signifikan.

b. Risiko kredit

Risiko kredit terutama berasal dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang non-usaha dan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

I. Financial risk factors (continued)

Risk management is the responsibility of the Board of Directors. The Board of Directors has the responsibility to determine the basic principles of the Group's risk management as well as principles covering specific areas, such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk and the liquidity risk.

a. Market risk

i. Foreign exchange risk

On a cash basis, the majority of the Group's transactions are denominated in Rupiah, which reduces the impact of fluctuations in foreign exchange rates. Therefore, the Group assesses the foreign exchange risk as minimal.

ii. Interest rate risk

Interest rate exposure is monitored to minimise any negative impact to the Group. Interest rate of the Group's shareholder loan are using fixed rates, therefore there is no floating interest rate risk from the shareholder loan.

As at 31 December 2022, the financial assets and financial liabilities of the Group which are impacted by floating interest rates are cash and cash equivalents in banks and restricted cash and cash equivalents in banks. Floating interest rate risk on cash and cash equivalents in banks and restricted cash and cash equivalents in banks is not significant.

b. Credit risk

Credit risk arises from cash and cash equivalents, trade receivables, non-trade receivables and restricted cash and cash equivalents.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/62 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

I. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Untuk piutang usaha, Grup menilai bahwa risiko kredit adalah minimal karena piutang usaha mayoritas berasal dari PLN dan entitas anaknya. Untuk kas dan setara kas dan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, Grup meminimalisir risiko kredit dengan melakukan penempatan pada beberapa bank untuk menghindari pemusatan yang signifikan dengan satu institusi.

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

I. Financial risk factors (continued)

b. Credit risk (continued)

For trade receivables, the Group assesses the credit risk is minimal as trade receivables mostly derived from PLN and its subsidiaries. For cash and cash equivalents and restricted cash and cash equivalents, the Group minimise credit risk by placing the funds in several banks to avoid significant concentration with one institution

	2022	2021	
Kas dan setara kas di bank			Cash and cash equivalents in banks
Pefindo			Pefindo
AAA	638,617	806,113	AAA
AA	96	96	AA
A	<u>442</u>	<u>220</u>	A
	<u>639,155</u>	<u>806,429</u>	
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya			Restricted cash and cash equivalents
Pefindo			Pefindo
AAA	13,617	11,643	AAA
A	<u>10,142</u>	<u>9,581</u>	A
	<u>23,759</u>	<u>21,224</u>	
Piutang usaha			Trade receivables
Dengan pihak yang memiliki peringkat kredit eksternal			Counterparties with external credit rating
Pefindo			Pefindo
AAA	-	92,849	AAA
Fitch			Fitch
BBB	<u>618,204</u>	<u>562,350</u>	BBB
Dengan pihak yang tidak memiliki peringkat kredit eksternal			Counterparties without external credit rating
Grup 1	197,388	14,700	Group 1
Grup 2	<u>201,498</u>	<u>521,087</u>	Group 2
	<u>398,886</u>	<u>535,787</u>	
	<u>1,017,090</u>	<u>1,190,986</u>	

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/63 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2022

*(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)*

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

I. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

I. Financial risk factors (continued)

b. Risiko kredit (lanjutan)

b. Credit risk (continued)

	2022	2021	
Piutang non-usaha Dengan pihak yang memiliki peringkat kredit eksternal Fitch BBB	700,001	490,268	Non-trade receivables Counterparties with external credit rating Fitch BBB
Dengan pihak yang tidak memiliki peringkat kredit eksternal Grup 2	50,282	24	Counterparties without external credit rating Group 2
	750,283	490,292	

- Grup 1 - pelanggan baru/pihak-pihak berelasi (kurang dari enam bulan).
- Grup 2 - pelanggan yang sudah ada/pihak-pihak berelasi (lebih dari enam bulan) tanpa adanya kasus gagal bayar di masa terdahulu.

- Group 1 - new customers/related parties (less than six months).
- Group 2 - existing customers/related parties (more than six months) with no defaults in the past.

c. Risiko likuiditas

c. Liquidity risk

Risiko likuiditas muncul dalam situasi Grup kesulitan memperoleh pendanaan. Kebijakan manajemen risiko likuiditas yang berhati-hati dilakukan dengan menjaga kecukupan kas dan setara kas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual serta menyesuaikan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

Liquidity risk arises in situations where the Group has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Group manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/64 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

I. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan liabilitas keuangan Grup berdasarkan jatuh temponya. Jumlah yang terdapat di tabel ini adalah nilai kontraktual yang tidak didiskontokan:

	Jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan/ <i>Contractual maturities of financial liabilities</i>				Jumlah/ <i>Total</i>
	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ Over one year but not longer than three years	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ Over three years but not longer than five years	Lebih dari lima tahun/ More than five years		
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year				
2022					
Utang usaha	1,128,205	-	-	-	1,128,205
Utang lain-lain	342,665	54,899	-	-	397,564
Biaya yang masih harus dibayar	405,107	-	-	-	405,107
Pinjaman pemegang saham	80,902	190,924	224,098	139,098	635,022
Liabilitas sewa	3,901	2,687	-	-	6,588
	1,960,780	248,510	224,098	139,098	2,572,486
2021					
Utang usaha	1,779,422	-	-	-	1,779,422
Utang lain-lain	277,598	142,213	-	-	419,811
Biaya yang masih harus dibayar	414,335	-	-	-	414,335
Pinjaman pemegang saham	99,293	161,981	197,811	248,196	707,281
Liabilitas sewa	4,474	2,008	-	-	6,482
	2,575,122	306,202	197,811	248,196	3,327,331

II. Manajemen risiko permodalan

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Grup terdiri dari pinjaman ekuitas pemegang saham. Direksi secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

III. Estimasi nilai wajar

Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangannya mendekati nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan tersebut pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

I. Financial risk factors (continued)

c. Liquidity risk (continued)

The table below describes the Group's financial liabilities based on their maturities. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows:

	Jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan/ <i>Contractual maturities of financial liabilities</i>				Jumlah/ <i>Total</i>
	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ Over one year but not longer than three years	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ Over three years but not longer than five years	Lebih dari lima tahun/ More than five years		
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year				
2022					
Trade payables					
Utang usaha	1,128,205	-	-	-	1,128,205
Other payables					
Utang lain-lain	342,665	54,899	-	-	397,564
Accrued expenses					
Biaya yang masih harus dibayar	405,107	-	-	-	405,107
Shareholder loan					
Pinjaman pemegang saham	80,902	190,924	224,098	139,098	635,022
Lease liabilities					
Liabilitas sewa	3,901	2,687	-	-	6,588
	1,960,780	248,510	224,098	139,098	2,572,486
2021					
Trade payables					
Utang usaha	1,779,422	-	-	-	1,779,422
Other payables					
Utang lain-lain	277,598	142,213	-	-	419,811
Accrued expenses					
Biaya yang masih harus dibayar	414,335	-	-	-	414,335
Shareholder loan					
Pinjaman pemegang saham	99,293	161,981	197,811	248,196	707,281
Lease liabilities					
Liabilitas sewa	4,474	2,008	-	-	6,482
	2,575,122	306,202	197,811	248,196	3,327,331

II. Capital risk management

The Group manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with covenants of capital adequacy ratio. The Group's capital structure consists of shareholders' equity. The Board of Directors regularly reviews the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

III. Fair value estimation

Management is of the opinion that the carrying value of its financial assets and liabilities approximates the fair value of the financial assets and liabilities as at 31 December 2022 and 2021.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/65 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. TAMBAHAN INFORMASI TERKAIT ARUS KAS

Tabel dibawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan non-kas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

	2021	Penambahan/ Addition	Pembayaran/ Repayment	Amortisasi nilai wajar/ Amortisation fair value	Penyesuaian nilai wajar/ Fair value adjustment	2022		
							2020	2021
Pinjaman pemegang saham Liabilitas sewa	701,012 5,621	- 6,829	(237,471) (6,249)	71,086 -	93,294 -	627,921 6,201		Shareholder loan Lease liabilities
Pinjaman pemegang saham Liabilitas sewa	889,640 6,137	- -	(255,491) (516)	66,863 -	- -	701,012 5,621		Shareholder loan Lease liabilities

25. PENCABUTAN IUP

Pada bulan April 2022, Pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") mencabut IUP MAP dan PBI. Dalam siaran persnya, BKPM menyatakan bahwa kriteria pencabutan IUP adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan pemegang IUP dinyatakan pailit.
2. Masa berlaku izin telah habis.
3. Memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") tetapi tidak mengajukan rencana kerja dan anggaran ke MESDM.
4. Izin sudah lengkap tetapi kegiatan di lapangan tidak dilakukan/tidak beroperasi.
5. Pemiliknya tidak jelas, dan izinnya hanya dijadikan agunan bank dan tidak direalisasikan.

Di bulan April 2022, MAP dan PBI telah mengirimkan surat keberatan atas pencabutan IUP kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM terkait keputusan mereka untuk mencabut IUP MAP dan PBI. Manajemen telah menjelaskan bahwa alasan belum dimulainya kegiatan operasi komersial MAP dan PBI karena proses pembangunan PLTU yang akan dipasok batubaranya belum dimulai di tahun 2022.

24. ADDITIONAL INFORMATION RELATED TO CASH FLOWS

The table below details changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

25. IUP REVOCATION

In April 2022, the Government of Indonesia through Indonesia Investment Coordination Board (Badan Koordinasi Penanaman Modal or "BKPM") revoked the IUPs of MAP and PBI. In its press release, BKPM stated that the criteria for revoking an IUP is as follows:

1. *The company who holds the IUP is declared bankrupt.*
2. *The validity period of the permit has expired.*
3. *Has a borrow-to-use forest area permit ("IPPKH") but did not submit a work and a plan budget to MoEMR.*
4. *Permits are complete but activities in the field are not being carried out/are not operating.*
5. *The owner is unclear, and the permit is only used as collateral for the bank and is not realised.*

In April 2022, MAP and PBI sent the objection letters related to the IUPs revocation to the Minister of Investments/Head of BKPM regarding their decision to revoke the IUPs of MAP and PBI. Management explained that the reason MAP and PBI have not yet started their commercial operation is due to construction process of the PLTUs which are planned to be supplied with the coal have not yet started in 2022.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA (dahulu/formerly PT PLN BATUBARA)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/66 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2022

*(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)*

25. PENCABUTAN IUP (lanjutan)

Selanjutnya, pada tanggal 26 Mei 2023, Grup menerima surat no. 203/B.4/A.1/2023 dari BKPM yang menyatakan bahwa IUP MAP dan PBI telah masuk pada proses pemulihan yang akan direalisasikan melalui Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM tentang pembatalan atas pencabutan IUP.

Manajemen berkeyakinan bahwa IUP MAP dan PBI akan kembali pulih sehingga tidak ada dampak signifikan terhadap posisi keuangan Grup di tahun 2022.

25. IUP REVOCATION (continued)

Subsequently, on 26 May 2023, the Group received a letter no. 203/B.4/A.1/2023 from BKPM which stated that the IUPs of MAP and PBI have entered the recovery process and will be realised through a Decree of Minister of Investment/Head of BKPM for the cancellation of IUP revocation.

Management believes that the IUPs of MAP and PBI will be recovered and therefore have no significant impact on the financial position of the Group in 2022.

**26. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi pada tanggal 9 Juni 2023.

**26. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND
APPROVAL OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

These consolidated financial statements were prepared and authorised for issuance by the Board of Directors on 9 June 2023.